



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP
IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN
TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA DINAS
PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIAT
DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN SKPKD PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN)**

TESIS



**YONI ELVIS
0821220012**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

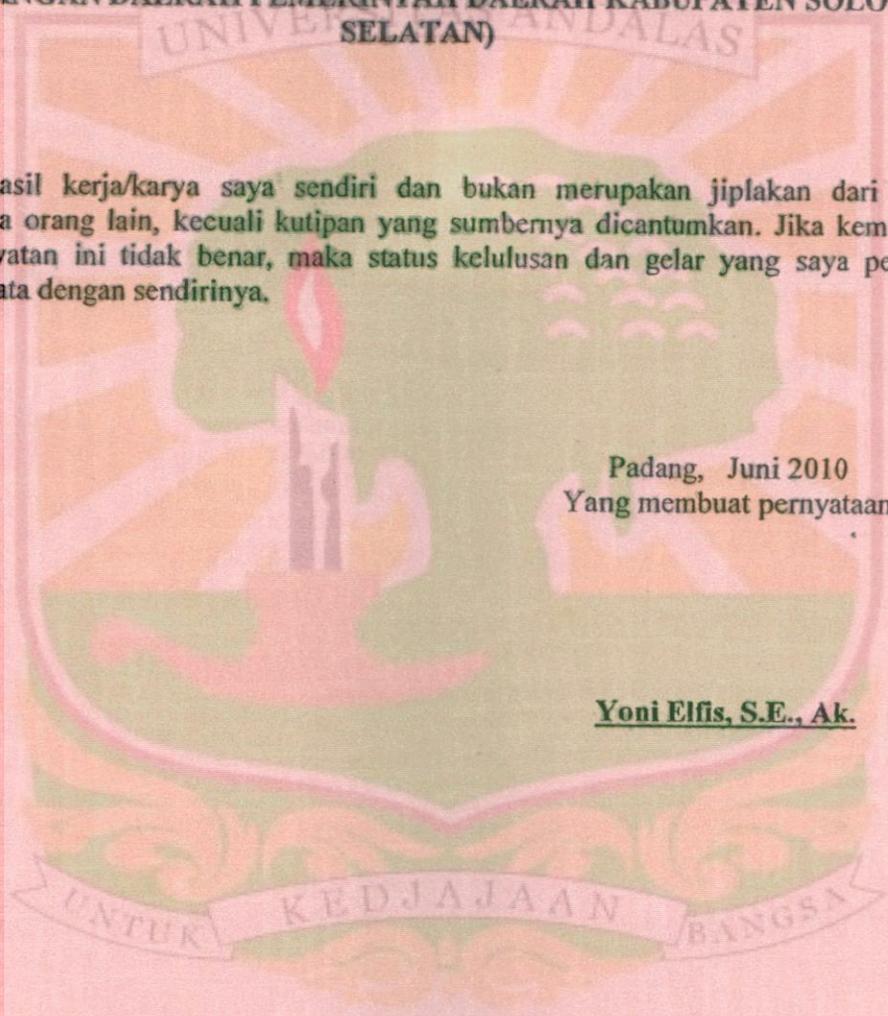
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul:

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHAAN, DINAS PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN SAUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN)

Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi bata dengan sendirinya.

Padang, Juni 2010
Yang membuat pernyataan

Yoni Elfis, S.E., Ak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Solok pada tanggal 20 Agustus 1982, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari Ayah Darpilus (alm) dan ibu Srihayati. Penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1994 di SDN 16 Nan Balimo Kota Solok, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1997 di MTsN Kota Solok dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2000 di SMUN 1 Kota Solok. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dengan program kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.

Pada April tahun 2006 penulis diangkat sebagai CPNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sejak Mei 2010 penulis diangkat dalam jabatan struktural eselon IV sebagai Kasi. Verifikasi dan Pembukuan Pelaksanaan APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Solok Selatan. Selain sebagai PNS, pada tahun 2008 penulis juga sebagai dosen sekaligus Ketua Program Studi S1 Akuntansi pada STIE Widyaswara Indonesia Muara Labuh sejak tahun 2009 sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbilalamiin

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Akuntansi, dengan judul "Pengaruh Tingkat Ppendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah dengan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)".

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. DR. Yurniwati, SE, M.Si, Ak., dan Bapak Suhandi, S.E., M.Si, Ak., selaku Komisi Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga selesainya penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Bapak Drs. Johnny Hasan Basri, M.M., selaku Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin dan dorongan bagi penulis untuk melanjutkan studi ke S2.
3. Bapak Drs. Erizal.B, M.M., selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin bagi

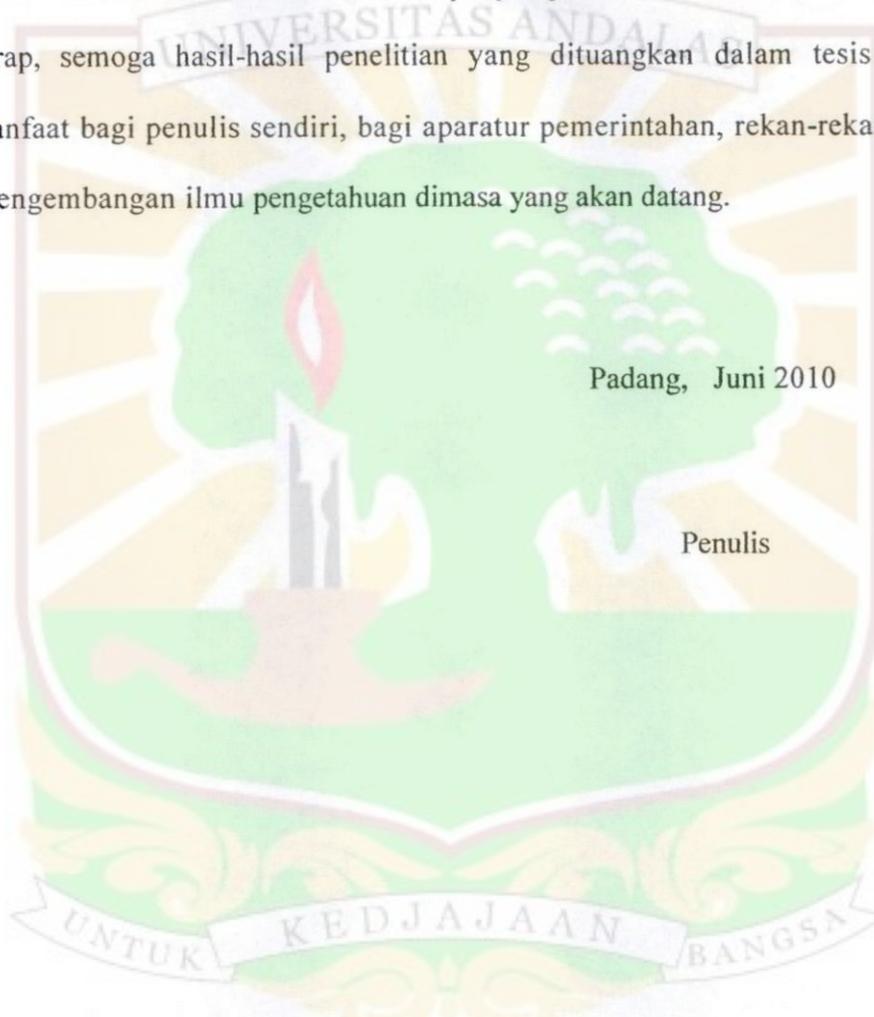
- penulis untuk melanjutkan studi ke S2 dan pengumpulan data penelitian.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan.
 5. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi ini.
 6. Mama dan almarhum Papa, serta keluarga besarku yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril, perhatian dan pengorbanan kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai cita-cita.
 7. Mama dan Papa Mertua serta keluarga yang tercinta yang telah memberikan nasehat, semangat dan dorongan serta perhatian dan pengertian kepada penulis dan keluarga kecilku sehingga penulis dapat selalu melangkah dengan sabar dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita.
 8. Istriku tercinta Silvia Rozanti, S.P., serta anak-anakku Atthifah Khairunnisa Elfis dan Muhammad Fathurrahman Elfis tersayang, terima kasih sayang atas semua dorongan, pengorbanan, semangat, kesabaran, ketabahan dan pengertian yang telah diberikan kepada Abi, sehingga Abi dapat melangkah dengan penuh kesabaran dan ketenangan dalam berangkat kuliah serta dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis ini.
 9. Rekan-rekan sejawat di kantor tempat penulis bekerja, sahabat karib dan teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Sains Akuntansi yang telah banyak membantu dalam penelitian, diskusi dan penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amiin.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah mengerahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan semaksimal mungkin namun penulis merasa yakin tesis ini tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat menearapkan saran dan kritikan dari kita semua demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi aparaturn pemerintahan, rekan-rekan pegawai dan pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Padang, Juni 2010

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Kajian Teoritis tentang Akuntansi Keuangan Daerah	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.1.3 Siklus/ Proses Akuntansi Keuangan Daerah	23
2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
2.1.2 Kajian Teoritis tentang Pengalaman Kerja	34
2.1.2.1 Pengertian Pengalaman Kerja	34
2.1.2.2 Pengukuran Pengalaman Kerja	35
2.1.3 Kajian Teoritis Tentang Tingkat Pendidikan	38
2.1.4 Kajian Teoritis tentang Tingkat Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	40
2.2 Pengembangan Hipotesis	44
2.2.1 Tingkat Pendidikan dan Implementasi Proses AKD	44
2.2.2 Pengalaman kerja dan Implementasi Proses AKD	45
2.2.3 Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Pegawai mengenai SAP	46

2.2.4	Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP	47
2.2.5	Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP dan Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah	48
2.2.6	Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP dan Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah	49
2.3	Model Penelitian	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Desain Penelitian	53
3.2	Identifikasi dan Operasional Variabel	53
3.3	Pengukuran Variabel Penelitian	
3.4	Populasi dan Sampel	59
3.5	Jenis dan Sumber Data	60
3.6	Metode Analisis Data	62
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	62
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	63
3.6.3	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan...	68
4.2	Hasil Penelitian	68
4.2.1	Deskripsi Responden	71
4.2.2	Pengujian Instrumen.....	99
4.2.2.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	99
4.2.2.2	Uji Normalitas	103
4.2.2.3	Uji Homogenitas	104
4.2.2.4	Uji Multikolinearitas.....	105
4.2.3	Analisa Regresi Berganda	106
4.2.3.1	Analisa Regresi Berganda Model I	106
4.2.3.2	Analisa Regresi Berganda Model II.....	109
4.2.3.3	Analisa Regresi Sederhana Model III.....	111

4.2.4 Pengujian Hipotesa	113
4.2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Implementasi Proses AKD	113
4.2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Implementasi Proses AKD	113
4.2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP	114
4.2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP	114
4.2.4.5 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP terhadap Implementasi Proses AKD	115
4.2.4.6 Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Implementasi Proses AKD melalui Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP.....	115
4.3 Pembahasan	120
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Implikasi	133
5.3 Keterbatasan Penelitian	134
5.4 Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

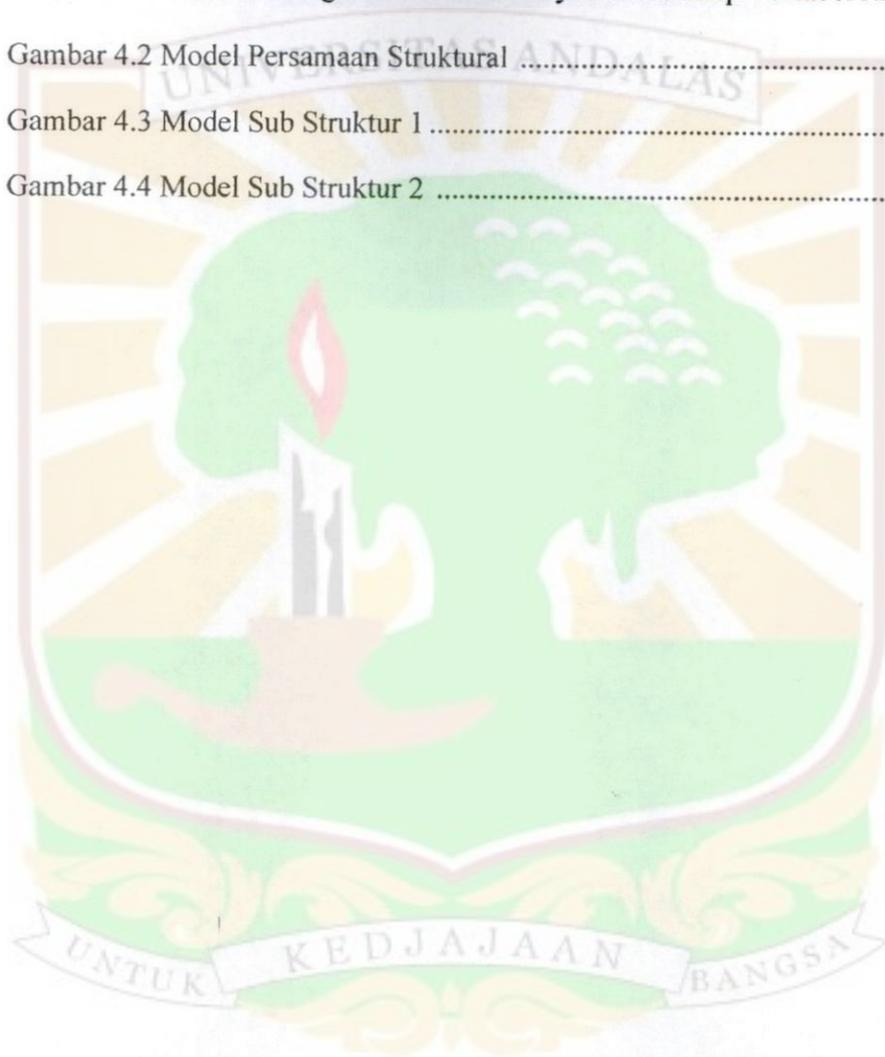
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasional Variabel	54
Tabel 3.2	Penilaian Variabel Tingkat Pendidikan	56
Tabel 3.3	Penilaian Variabel Pengalaman Kerja	57
Tabel 3.4	Penilaian Variabel Implementasi Proses AKD	57
Tabel 3.5	Penilaian Variabel Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP	59
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja	72
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan	73
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS	75
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan unit kerja	76
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan Jenis Pendidikan	79
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan Jenis Pendidikan berdasarkan unit kerja	80
Tabel 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	83
Tabel 4.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja sebagai PNS	84
Tabel 4.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja pada Bagian Keuangan	84
Tabel 4.11	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 02	85
Tabel 4.12	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 05	87

Tabel 4.13	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 06	89
Tabel 4.14	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 07	91
Tabel 4.15	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 08	93
Tabel 4.16	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai PSAP No. 09	95
Tabel 4.17	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP per unit kerja	97
Tabel 4.18	Karakteristik Responden Berdasarkan Implementasi Proses AKD.....	98
Tabel 4.19	KMO and Bartlett Test	99
Tabel 4.20	Anti Image Matrices	100
Tabel 4.21	Communities	100
Tabel 4.22	Componment Matrix	101
Tabel 4.23	Tingkat Reliabilitas	102
Tabel 4.24	Hasil Uji Reliabilitas	103
Tabel 4.25	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	104
Tabel 4.26	Hasil Uji Homogentas.....	105
Tabel 4.27	Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel 4.28	Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah	107
Tabel 4.29	Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP	109
Tabel 4.30	Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai SAP terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah	111
Tabel 4.31	Rangkuman Hasil Analisis Regresi Bertingkat	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Akuntansi Keuangan Daerah	26
Gambar 2.2	Model Penelitian Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja mempengaruhi proses Akuntansi Keuangan daerah dengan Tingkat Pemahaman Pegawai menegndai Standar Akuntansi pemerintahan sebagai Variabel Intervening	52
Gambar 3.1	Struktur Pengaruh Variabel Penyebab terhadap Variabel Akibat	65
Gambar 4.2	Model Persamaan Struktural	117
Gambar 4.3	Model Sub Struktur 1	118
Gambar 4.4	Model Sub Struktur 2	119



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Master Tabel

Lampiran 3 Distribusi Frekuensi

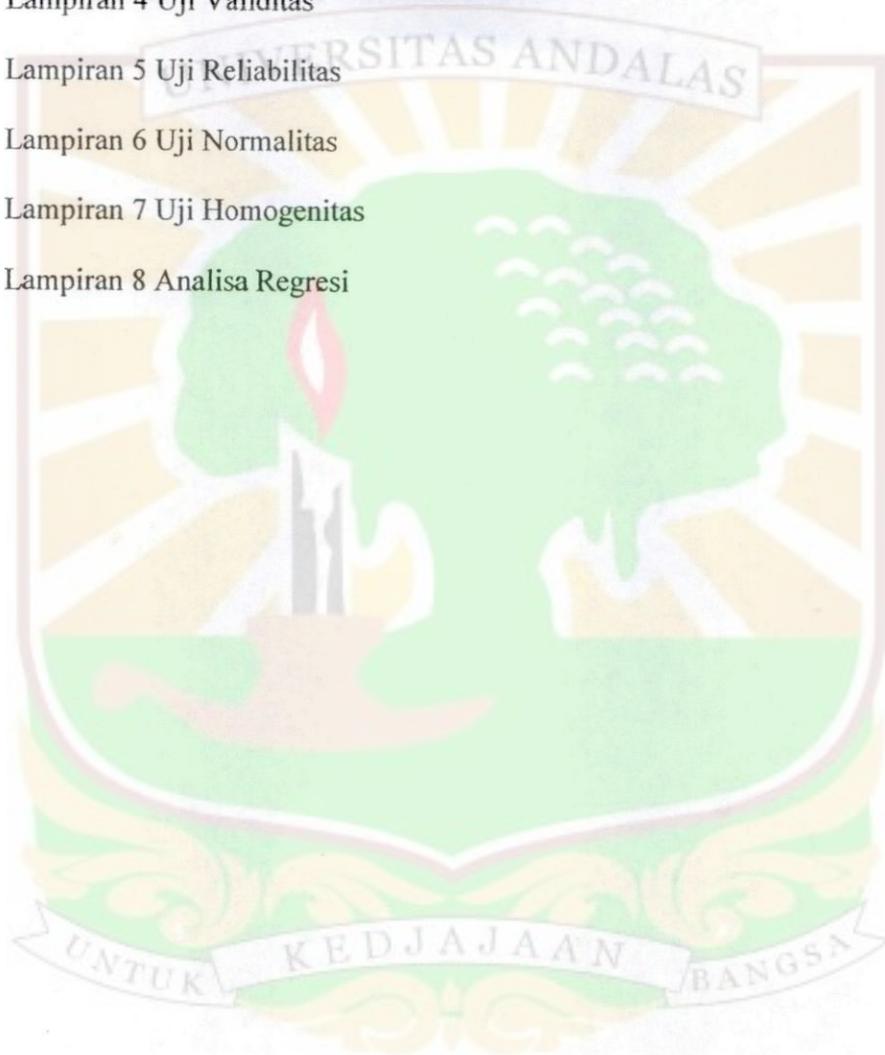
Lampiran 4 Uji Validitas

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Lampiran 6 Uji Normalitas

Lampiran 7 Uji Homogenitas

Lampiran 8 Analisa Regresi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1999 Pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya perubahan tidak hanya pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga pada pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan ditetapkannya 4 (empat) paket Undang-undang: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat paket Undang-undang tersebut juga mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengacu kepada keempat paket Undang-undang tersebut sehingga terdapat keseragaman antara pengelolaan dana APBN dan APBD.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan Atas Laporan Keuangan; dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menindaklanjuti reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut merupakan sinkronisasi dari berbagai undang-undang tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (*omnibus regulation*) pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Khusus untuk akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang lebih dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk operasional pada daerah, Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menyusun, melaksanakan dan menatausahakan APBD sedang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.

Keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membantu pemerintah pusat dan daerah dalam membuat laporan keuangan. PP 24 Tahun 2005 tersebut dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penyajian laporan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi pemerintah pusat dan daerah sebagai penyaji laporan dengan pengguna laporan serta pemeriksa laporan (auditor).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menatausahakan atas setiap transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan yang dilaksanakan melalui sistem dan proses atau siklus akuntansi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah melalui suatu sistem dan proses akuntansi yang lengkap dapat memudahkan untuk melakukan pengujian dan penelusuran (*treacing*) atas transaksi akuntansi yang dilaporkan.

Sistem dan proses atau siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Proses ini terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut (Nurlan,2009:41).

Untuk dapat melaksanakan proses akuntansi keuangan pada pemerintah daerah salah satunya ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya. Terkait masalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses akuntansi keuangan di daerah, dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), perlu dilakukan analisa terhadap tingkat pemahamannya dalam mengimplementasikan SAP tersebut agar LKPD yang dimaksud dapat disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut penelitian Aldiani, dkk (2007) tentang Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Artinya jika variabel sumber daya manusia ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penerapan PP No.24. Dalam menyusun laporan keuangan, kepala SKPD dan staf PPK SKPD masih menggunakan jasa konsultan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para staf PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah, dkk (2006) tentang Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilaksanakan di Kantor Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah kota di Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), didapatkan hasil bahwa faktor organisasional yang di uji, hanya dukungan atasan yang mempunyai pengaruh dalam peningkatan kegunaan SAKD.

Untuk melihat tingkat pemahaman sumber daya manusia di Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penerapan SAP tersebut, peneliti telah melakukan pengamatan dan wawancara pendahuluan terhadap beberapa pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana akuntansi dalam rangka penyusun laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Hasil sementara dari pengamatan dan wawancara awal tersebut menunjukkan masih kurangnya pemahaman pegawai dalam melaksanakan proses akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditandai dengan tidak dilakukannya proses pencatatan melalui penjurnalan, sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pengklasifikasian, pengikhtisaran, penyesuaian dan pelaporan transaksi keuangan pada tingkat SKPD. Pada tingkat SKPKD, proses akuntansi juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditandai dengan tidak melaksanakan proses akuntansi baik dari segi penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah.

Dari beberapa orang yang penulis temui pada saat obeservasi dan wawancara awal tersebut, pada tingkat SKPD didapatkan informasi bahwa hampir semua staf yang bertugas dalam melaksanakan proses akuntansi memiliki tingkat pendidikan yang tidak relevan dengan bidang kerja yang ditekuni saat ini dan rata-

rata memiliki pengalaman kerja yang baru dalam melaksanakan proses akuntansi. Sementara itu, pada tingkat SKPKD, rata-rata staf yang bertugas memiliki tingkat pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya saat ini, namun masih memiliki pengalaman yang kurang tentang proses akuntansi keuangan daerah.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pemahaman pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai standar akuntansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah dan menuangkannya dalam bentuk tesis.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah ?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah?
5. Apakah tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah?

6. Apakah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah melalui tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah ?

1.3. Tujuan

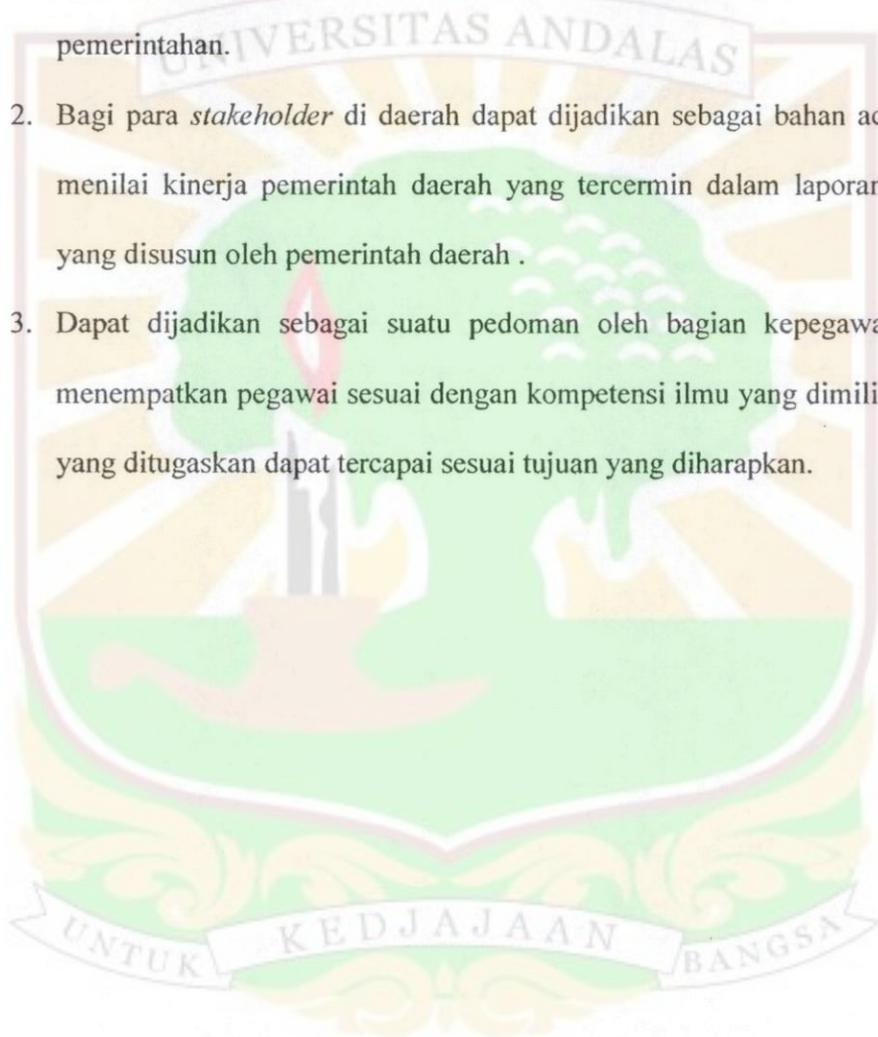
Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah;
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah; dan
6. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan dan penyempurnaan kekurangan yang barangkali masih terdapat dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
2. Bagi para *stakeholder* di daerah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menilai kinerja pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah .
3. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman oleh bagian kepegawaian dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi ilmu yang dimiliki agar apa yang ditugaskan dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Kajian Teoritis Tentang Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dalam Teori Akuntansi (Sofyan:5) adalah:

“proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”

Akuntansi menurut American Accounting Association (1966) dalam Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Abdul Halim:28) adalah :

“suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970) dalam Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Abdul Halim:28) adalah :

“suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.”

Dari pengertian akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang tujuan akhirnya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam suatu entitas atau organisasi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah:

“proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.”

Menurut Sugijanto, dkk (1995) bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Selain itu, menurut Nordiawan, dkk (2007), akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan yang menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara dan meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara, termasuk kesesuaian dengan UU yang berlaku.

Dari pengertian akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat

2.1.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gita Media Press:605) adalah :

“Ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai baku/tetap.”

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan prosedur

akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar yang memadai akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo,2002:149)

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sesuatu yang dapat dijadikan patokan dalam mengolah input berupa bukti-bukti transaksi melalui proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan menjadi output berupa laporan keuangan yang nantinya akan berguna bagi pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2005, penerapan ketentuan SAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlaku terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2005.

Dengan berlakunya SAP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD akan meliputi setidaknya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut pasal 2 ayat 1 PP nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintah, SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP yang dimaksud terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

2.1.1.2.1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan standar ini adalah untuk menggambarkan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.1.1.2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya tersebut dengan menyediakan :

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaan sumber tersebut.
- (b) Menyediakan informasi realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran harus menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- (a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas umum. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (b) Belanja, adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment).
- (c) Transfer, transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas ke entitas lain seperti pengeluaran dan perimbangan dana dan bagi hasil.
- (d) Surplus/Defisit, surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
- (e) Penerimaan Pembiayaan, adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah antara lain berasal penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi BUMN/BUMD, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dan penjualan investasi permanen lainnya.
- (f) Pengeluaran Pembiayaan, adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau

pembayaran klaim kepada pihak ketiga dalam periode tahun anggaran tertentu.

(g) Pembiayaan netto, adalah selisih yang diperoleh antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

(h) Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran, adalah akumulasi surplus/ defisit dengan pembiayaan netto.

2.1.1.2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.03 mengenai Laporan Arus Kas

Tujuan standar laporan arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pemerintah melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator terhadap jumlah dan kepastian arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atau taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran.

(a) Aktivitas Operasi, arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- (b) Aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.
- (c) Aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan defisit/surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas pemerintah di masa yang akan datang.
- (d) Aktivitas non anggaran, arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Entitas pemerintah harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

2.1.1.2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.04 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya untuk pembaca tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.
- (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Laporan berupa daftar dan skedul.

2.1.1.2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.05 mengenai Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (a) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (b) Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dicatat sebesar :

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan, harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

2.1.1.2.6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.06 mengenai Akuntansi Investasi

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa macam alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka

panjang dan memanfaatkan dan yang belum digunakan oleh pemerintah untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek yang merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang yang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

(b) Metode Ekuitas

Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu.

2.1.1.2.7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 mengenai Akuntansi Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2.1.1.2.8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.08 mengenai Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi, tujuan, dan penggunaan utama.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat suatu bagian dari aset tetap pemerintah dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

2.1.1.2.9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.09 mengenai Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang

dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2.1.1.2.10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 mengenai Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi

berulang. Dengan demikian yang termasuk peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan anggaran secara mendasar.

2.1.1.2.11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.11 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan period pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komperatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah pusat menyampaikan laporan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.

2.1.1.3. Siklus/Proses Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nurlan (2009:41), akuntansi adalah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas

kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain merupakan sistem, akuntansi merupakan siklus, artinya akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut.

Menurut Suhandi (2007:84), proses akuntansi adalah proses menganalisis transaksi, mencatat, mengklasifikasikan dan meringkaskan informasi untuk ditampilkan didalam laporan akuntansi. Proses tersebut berjalan terus menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus). Tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya disebut siklus akuntansi (*accounting cycle*). Proses akuntansi keuangan daerah umumnya meliputi langkah-langkah berikut:

a. Tahap Pencatatan

1. Dokumen transaksi dianalisis. Analisis dokumen transaksi memberikan landasan untuk pembuatan suatu catatan awal suatu transaksi.
2. Transaksi dicatat, berdasarkan dokumen transaksi, transaksi direkam dengan menggunakan ayat jurnal (*journal entries*), secara kronologis di dalam jurnal.

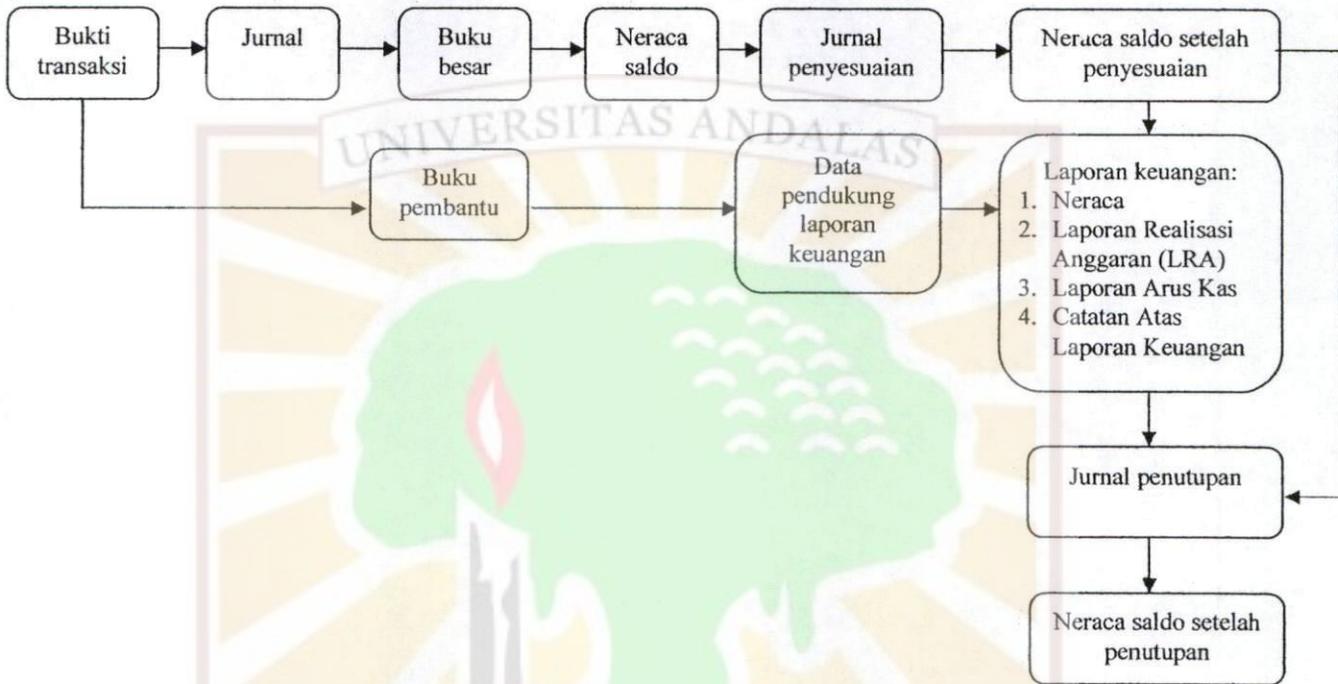
3. Transaksi diposkan. Transaksi, sebagaimana diklasifikasikan dan dicatat didalam jurnal, diposkan pada akun yang terkait.

Tahap Pengikhtisaran/Pelaporan

1. Neraca Saldo (*trial balance*), neraca percobaan secara sederhana mendata setiap akun di dalam buku besar. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan pencatatan.
2. Penyesuaian jurnal dicatat. Sebelum laporan keuangan dapat dipersiapkan, semua informasi relevansi yang belum dicatat harus ditentukan dan penyesuaian tepat dibuat. Jurnal penyesuaian harus dicatat dan dposting sehingga akun yang menunjukkan saldo yang seharusnya dalam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan dipersiapkan. Laporan meringkas (rekap) operasi dan menunjukkan posisi keuangan dan arus kas dipersiapkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari akun yang telah disesuaikan.
4. Akun nominal ditutup. Neraca dalam akun nominal (*temporal*) ditutup kedalam akun laba ditahan. Proses penutupan menghasilkan permulaan setiap periode akuntansi dengan neraca nol (*zero balance*) dalam semua rekening nominal.
5. Neraca saldo setelah penutupan (*post-closng trial balance*) dapat disiapkan. Neraca percobaan setelah penutupan disiapkan untuk menentukan kesamaan debit dan kredit setelah posting jurnal penyesuaian dan penutupan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, proses akuntansi keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Proses Akuntansi Keuangan Daerah



2.1.1.3.1. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, dimana data/bukti/dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan suatu entitas. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, beberapa pihak yang melakukan transaksi adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. Kepala SKPKD ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD adalah PPKD yang bertindak

- dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
3. Pengguna Anggaran (PA). PA adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 4. Pengguna Barang. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 5. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KuasaBUD). KuasaBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 6. Kuasa Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang dari pengguna anggaran guna melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 9. Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 10. Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah. Tim ini bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1.3.2. Jurnal

Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Dalam jurnal ini, transaksi keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula kegiatan peringkasan data dilakukan dengan hasil peringkasanya (berupa jumlah rupiah dari transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

Transaksi yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal untuk penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal untuk pengeluaran kas.

2.1.1.3.3. Buku Besar dan Buku Besar Pembantu

Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat aktiva, kewajiban atau utang dan ekuitas secara terpisah.

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening-rekening dalam buku besar yang umumnya

memerlukan buku besar pembantu adalah : piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan utang beberapa rekening objek pendapatan dan objek belanja / biaya umumnya juga memerlukan buku pembantu.

2.1.1.3.4. Daftar Saldo

Daftar saldo merupakan daftar rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu.

2.1.1.3.5. Kertas Kerja

Kertas kerja merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi keuangan manual. Kertas kerja dibedakan untuk laporan triwulan dan laporan tahunan.

2.1.1.3.6. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan pengaitan yang tepat antara pendapatan dengan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika terdapat transaksi yang memengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengakui pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut diperoleh dan untuk mengakui belanja/biaya pada periode di mana barang dan jasa yang berkaitan dipergunakan.

2.1.1.3.7. Jurnal Eliminasi

Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi (menghilangkan) saldo dari semua rekening timbal balik antara pemda dan dinas. Hal ini dilakukan

dengan mendebit rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal balik yang bersaldo debit.

Hal ini disebabkan karena dalam rekening timbal balik, setiap penambahan hak pemkab/pemkot kepada dinasnya berarti penambahan kewajiban dinas itu kepada pemprop/pemkab/pemkotnya. Demikian pula sebaliknya, setiap transaksi yang memengaruhi saldo rekening koran pemkab/pemkot sama dengan transaksi yang memengaruhi saldo rekening koran dinasnya.

2.1.1.3.8. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan, serta kemajuan realisasi dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan periode waktunya, terdapat jenis laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. Sementara, berdasarkan unit kerja, terdapat laporan keuangan dinas/instansi dan laporan keuangan konsolidasian pemkab/pemkot. Masalah laporan keuangan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Tabel 2.3 berikut menjelaskan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan.

2.1.1.3.9. Jurnal Penutup

Jurnal penutup merupakan langkah yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi. Langkah ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup biasanya dilakukan hanya pada akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini menyebabkan

saldo dari rekening pendapatan dan belanja/biaya menjadi nol sehingga rekening-rekening tersebut siap kembali menerima data akuntansi periode berikutnya.

2.1.1.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.1.4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2.1.1.4.3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

2.1.1.4.4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

2.1.2. Kajian Teoritis Tentang Pengalaman Kerja

2.1.2.1. Pengertian Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang,1984:15).

Pendapat lain mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Ranupandojo, 1984 : 71).

Menurut Trijoko, pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980 : 82).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.

2.1.2.2. Pengukuran Pengalaman Kerja

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang (Asri, 1986 : 131) adalah:

1) Gerakannya mantap dan lancar

Setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan.

2) Gerakannya berirama

Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

3) Lebih cepat menanggapi tanda – tanda

Artinya tanda – tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja

4) Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya.

Karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya maka seorang pegawai yang berpengalaman dapat menduga akan adanya kesulitan dan siap menghadapinya.

5) Bekerja dengan tenang

Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri yang cukup besar

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja karyawan. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi – kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial . beberapa faktor tersebut (Handoko, 1984 : 241) adalah :

- 1) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.
- 2) Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan seseorang.
- 3) Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang.
- 4) Kemampuan – kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan.
- 5) Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek – aspek tehnik pekerjaan.

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja (Foster, 2001 : 43) yaitu :

1) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya berirama, lebih cepat menanggapi tanda-tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor lain yaitu : lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang mempunyai kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja.

Selanjutnya dalam penelitian ini, untuk mengukur pengalaman kerja pegawai, peneliti hanya menggunakan indikator lama waktu atau masa kerja, yaitu masa kerja mulai dari pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil sampai dengan sekarang dan masa kerja pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan.

2.1.3. Kajian Teoritis Tentang Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikannya diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.

Pendidikan adalah proses sistematis dari penambahan pengetahuan menuju perubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi. Biasanya pendidikan dianggap sebagai proses transformasi pengetahuan secara formal di sekolah, akademi atau perguruan tinggi dengan tujuan mewakili suatu perluasan individu sehingga dia dapat dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi dan memilih respon yang paling tepat.

Thoha (1990:70) mengatakan bahwa kemampuan merupakan suatu unsur dalam kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Seseorang yang memperoleh pendidikan dapat memiliki kematangan dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Pendidikan formal sangat dominan dalam menentukan kearah itu.

Harsey dan Blanchard (1998:184) mengatakan tingkat pendidikan formal akan mempengaruhi kemampuan dan motivasi berprestasi.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Pendidikan saat ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Mashuri mengutarakan pentingnya pendidikan sebagai berikut :

“Pada hakekatnya sejarah peradaban manusia adalah sejarah perjuangan manusia yang berlangsung dari abad ke abad untuk mewujudkan kepribadiannya dan mengembangkan hidupnya, dengan menggunakan setiap kemungkinan, baik yang ada maupun yang terbuka sebagai hasil budidayanya menghadapi segala hambatan-hambatan dan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi sepanjang perjalanan hidupnya, sebagai halnya dimasa lampau dalam perjuangan untuk masa yang akan datang. Dalam proses itu, pendidikan senantiasa merupakan faktor yang menentukan, baik dalam arti peranan maupun kegunaannya, sebab tidak lain pendidikan bertujuan agar manusia mempunyai kelengkapan yang diperlukan agar pada tiap-tiap tahap selalu mampu menghadapi tantangan, baik fisik, emosi maupun intelektualnya (Mashuri : 2000).

Dengan melihat batasan di atas dapat dipertegas bahwa pendidikan formal lebih menekankan pada pengembangan kemampuan secara menyeluruh (overall), penekanan area kemampuan kognitif, afektif, dan psychomotorik. Jangka waktu pelaksanaannya panjang (long term), materi yang diberikan lebih umum, menggunakan metode belajar mengajar yang konversial, penghargaan akhir proses

adalah gelar (degree). Sedangkan pendidikan non formal lebih pada pengembangan kemampuan khusus (specific), area kemampuan penekanannya pada psikomotor, jangka waktu pelaksanaan lebih pendek, materi yang diberikan lebih khusus, menggunakan metode belajar mengajar konvensional, penghargaan akhir proses adalah sertifikat (non-degree).

Pada penelitian ini, indikator tingkat pendidikan yang digunakan adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dilihat dari tingkat dan jenis pendidikan terakhir pada saat diterima sebagai pegawai negeri sipil dan pendidikan terakhir sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilihat dari keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang sudah pernah diikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

2.1.4. Kajian teoritis tentang tingkat pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pandai atau mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan Pemahaman adalah kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 2003: 92).

Menurut Bloom dkk (1956) dalam Sumarni (2005:72), pemahaman (*comprehension*) merupakan salah satu aspek dalam ranah kognitif. Disini pemahaman berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Kemampuan ini dapat dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu menerjemahkan (*translation*), menginterpretasi (*interpretation*), dan mengekstrapolasi (*ekstrapolation*).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sudjana (1992) dalam Sumarni (2005:72), bahwa pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yakni menghubungkan bagian yang terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi, dari pemahaman ini diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun masalahnya

Sedangkan menurut The Liang Gie (1978) dalam Rahman (2003: 93), pemahaman dapat dicapai dengan lima cara, yaitu:

- a. Menyatukan dan menghubung-hubungkan berbagai fakta atau gagasan
- b. Mendeduksikan sesuatu dari premis-premis
- c. Menyesuaikan berbagai fakta atau gagasan baru dengan pengetahuan yang mapan
- d. Meninjau gagasan dalam hubungannya dengan ketepatan dan kepentingannya

- e. Menghubungkan suatu fakta atau gagasan dengan sesuatu yang diketahui, universal dan terikat pada kaidah

Menurut Sardiman AM (1990) dalam Nurhayati (1999: 10), pemahaman atau *comprehension* diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, memahami maksudnya, menangkap maknanya dari sesuatu yang dipahami. Pemahaman tidak sekedar tahu mengerti, tetapi juga menghendaki agar seseorang dapat memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah dipahami. Pemahaman bersifat dinamis dan kreatif sehingga akan menghasilkan imajinasi dan pikiran yang terang.

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif tingkat rendah. Kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak berarti bahwa pengetahuan tidak perlu diperhatikan, sebab untuk dapat memahami sesuatu terlebih dahulu harus mengetahui atau mengenal sesuatu tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nana Sudjana dalam bukunya "Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar", bahwa pengetahuan merupakan prasarat bagi pemahaman (Nana Sudjana, 1992 dalam Nurhayati, 1999: 11).

Menurut Suharsimi (1991: 112), pemahaman seseorang dapat membuktikan bahwa ia mampu menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep secara sederhana. Selanjutnya ia menambahkan bahwa dengan memahami sesuatu, seseorang akan dapat membedakan, mempertahankan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, menuliskan kembali, memberi contoh, dan memperkirakan.

Pada penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman terhadap akuntansi. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan

seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Sedangkan Pemahaman akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses dan siklus akuntansi sesuai dengan SAP. Tingkat pemahaman mengenai SAP ini dapat diukur dari pemahaman seseorang terhadap seluruh pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, antara lain:

1. Pemahaman tentang PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. Pemahaman tentang PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. Pemahaman tentang PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. Pemahaman tentang PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. Pemahaman tentang PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. Pemahaman tentang PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. Pemahaman tentang PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. Pemahaman tentang PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Pemahaman tentang PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. Pemahaman tentang PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. Pemahaman tentang PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Dari 11 (sebelas) PSAP tersebut, yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji dan menjelaskan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP adalah 6 (enam) PSAP yaitu: PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP Nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP Nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dan PSAP Nomor 9 tentang akuntansi kewajiban.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Tingkat Pendidikan dan Implementasi Proses AKD

Pendidikan adalah proses sistematis dari penambahan pengetahuan menuju perubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi. Biasanya pendidikan dianggap sebagai proses transformasi pengetahuan secara formal di sekolah, akademi atau perguruan tinggi dengan tujuan mewakili suatu perluasan individu sehingga dia dapat dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi dan memilih respon yang paling tepat.

Laporan keuangan yang sudah disusun oleh pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tersebut harus mempedomani seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut hasil penelitian Aldiani, dkk (2007), salah satu variabel penelitian didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Artinya jika variabel sumber daya manusia ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penerapan PP No.24. Dalam menyusun laporan keuangan, kepala SKPD dan staf PPK SKPD masih menggunakan jasa konsultan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para staf PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dilihat dari tingkat dan jenis pendidikan terakhir pada saat diterima sebagai pegawai negeri

sipil dan pendidikan terakhir sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilihat dari keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang sudah pernah diikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah

2.2.2 Pengalaman Kerja dan Implementasi Proses AKD

Seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi atau keuangan sebelumnya akan mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini, untuk mengukur pengalaman kerja pegawai, peneliti hanya menggunakan indikator lama waktu atau masa kerja, yaitu masa kerja mulai dari pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil sampai dengan sekarang dan masa kerja pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan

Untuk dapat melakukan proses akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan SAP tersebut, pegawai yang bertanggungjawab dalam hal ini harus memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam SAP tersebut. Untuk dapat memahami dan melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah juga ditunjang dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pegawai yang melaksanakannya, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah

2.2.3. Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Pendidikan adalah proses sistematis dari penambahan pengetahuan menuju perubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi. Biasanya pendidikan dianggap sebagai proses transformasi pengetahuan secara formal di sekolah, akademi atau perguruan tinggi dengan tujuan mewakili suatu perluasan individu sehingga dia dapat dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi dan memilih respon yang paling tepat.

Menurut Indra Bastian (2006), Penyiapan dan penyusunan Laporan keuangan tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai akuntansi pemerintahan. Perlu penyesuaian antardunia pendidikan dengan dunia praktisi. Untuk dapat menjalankan praktek akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan, dapat ditempuh dengan peningkatan pengalaman dan pendidikan pegawai yang sudah pernah bertugas dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut. Atau dapat ditempuh dengan mengangkat pegawai baru yang memiliki relevansi bidang ilmu yang sama dengan tugas yang akan diembannya.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dilihat dari tingkat dan jenis pendidikan terakhir pada saat diterima sebagai pegawai negeri sipil dan pendidikan terakhir sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilihat dari keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang sudah pernah diikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah

2.2.4. Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja (Foster, 2001 : 43) yaitu :

1) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan.

Berdasarkan hal di atas, seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi atau keuangan sebelumnya akan mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini,

untuk mengukur pengalaman kerja pegawai, peneliti hanya menggunakan indikator lama waktu atau masa kerja, yaitu masa kerja mulai dari pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil sampai dengan sekarang dan masa kerja pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP

2.2.5. Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP dan Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang sudah disusun oleh pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tersebut harus mempedomani seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut hasil penelitian Aldiani, dkk (2007), salah satu variabel penelitian didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Artinya jika variabel sumber daya manusia ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penerapan PP No.24. Dalam menyusun laporan keuangan, kepala SKPD dan staf PPK SKPD masih menggunakan jasa konsultan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para staf PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan.

Untuk dapat melakukan proses akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan SAP tersebut, pegawai yang bertanggungjawab dalam hal ini harus

memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam SAP tersebut. Untuk dapat memahami dan melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah juga ditunjang dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Setelah mereka memahami SAP diharapkan pegawai tersebut dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah

2.2.6. Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP dan Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah

Dengan melihat batasan di atas dapat dipertegas bahwa pendidikan formal lebih menekankan pada pengembangan kemampuan secara menyeluruh (overall), penekanan area kemampuan kognitif, afektif, dan psychomotorik. Jangka waktu pelaksanaannya panjang (long term), materi yang diberikan lebih umum, menggunakan metode belajar mengajar yang konvensional, penghargaan akhir proses adalah gelar (degree). Sedangkan pendidikan non formal lebih pada pengembangan kemampuan khusus (specific), area kemampuan penekanannya pada psikomotor, jangka waktu pelaksanaan lebih pendek, materi yang diberikan lebih khusus, menggunakan metode belajar mengajar konvensional, penghargaan akhir proses adalah sertifikat (non-degree).

Menurut Indra Bastian (2006), Penyiapan dan penyusunan Laporan keuangan tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai akuntansi pemerintahan. Perlu penyesuaian antardunia pendidikan dengan dunia praktisi. Untuk dapat menjalankan praktek akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan, dapat ditempuh dengan peningkatan pengalaman dan pendidikan pegawai yang sudah pernah bertugas dalam penyiapan dan penyusunan laporan

keuangan tersebut. Atau dapat ditempuh dengan mengangkat pegawai baru yang memiliki relevansi bidang ilmu yang sama dengan tugas yang akan diembannya.

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja (Foster, 2001 : 43) yaitu :

1) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan.

Menurut hasil penelitian Aldiani, dkk (2007), salah satu variabel penelitian didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Artinya jika variabel sumber daya manusia ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penerapan PP No.24. Dalam menyusun laporan keuangan, kepala SKPD dan staf PPK SKPD masih menggunakan jasa konsultan. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para staf PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan.

Untuk dapat melakukan proses akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan SAP tersebut, pegawai yang bertanggungjawab dalam hal ini harus memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam SAP tersebut. Untuk dapat memahami dan melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah juga ditunjang dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pegawai yang melaksanakannya. Setelah mereka memahami SAP diharapkan pegawai tersebut dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai intervening

Dari pengembangan hipotesis di atas, dapat dibuat ringkasan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

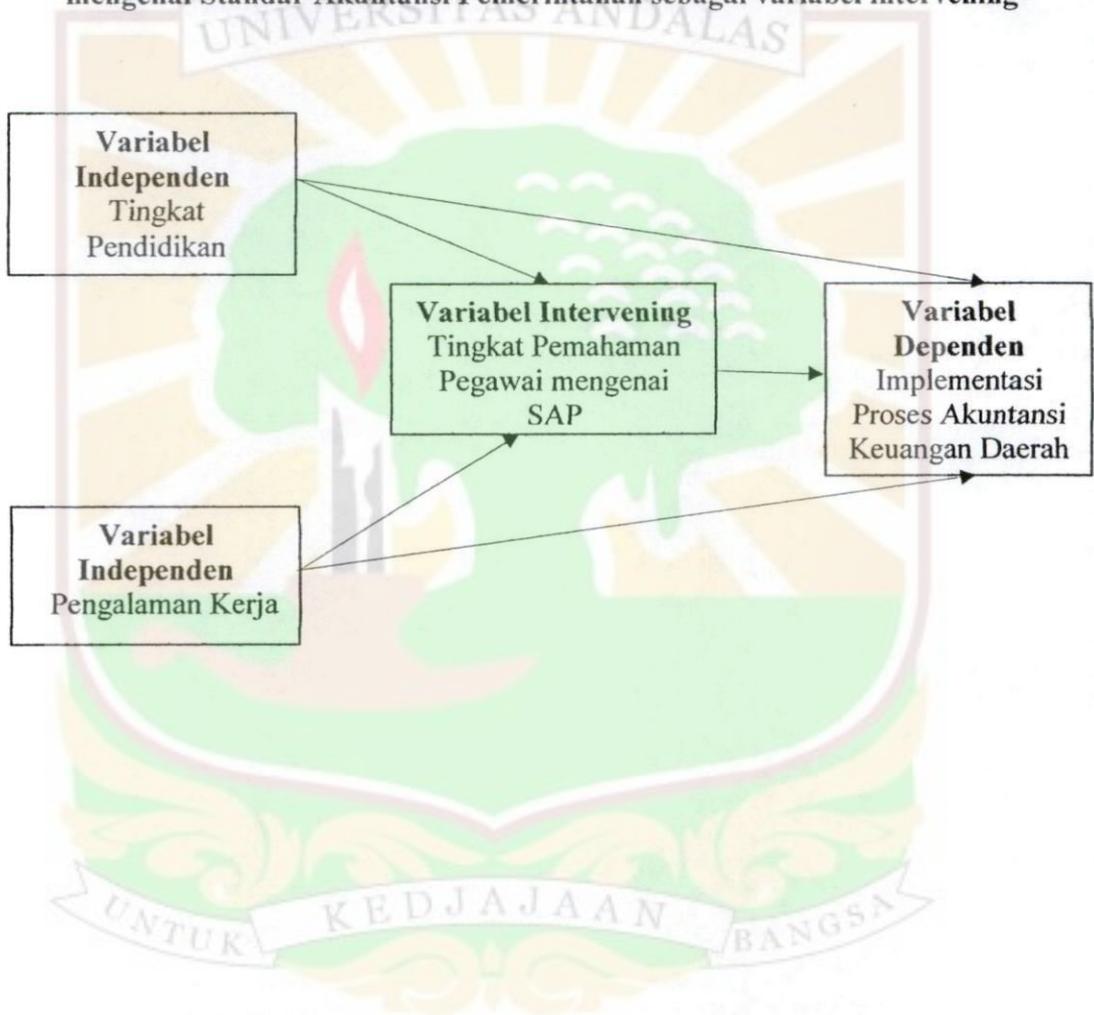
Tabel 2.1.
Ringkasan Hipotesis Penelitian

H	Uraian
H1	<i>Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah</i>
H2	<i>pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah</i>
H3	<i>Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah</i>
H4	<i>Pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP</i>
H5	<i>Tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah</i>
H6	<i>Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai intervening</i>

2.3. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 2.2):

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja mempengaruhi Proses Akuntansi Keuangan Daerah dengan Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel intervening



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Disain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan, tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah dan pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah.

Disamping itu penelitian ini juga menjelaskan secara deskriptif bagaimana tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagaimana pengalaman kerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagaimana tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah serta bagaimana implementasi proses akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

3.2. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel intervening. Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel

intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (Indriantoro,1999:66).

Variabel dependen penelitian adalah proses akuntansi keuangan daerah. Variabel independen dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sedangkan Variabel intervening adalah tingkat pemahaman karyawan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Semua perhitungan dan analisa statistik dilakukan dengan menggunakan piranti lunak SPSS 15 for windows.

Berikut ini disajikan tabel operasionalisasi variabel yang dijadikan acuan dalam penyusunan kuesioner.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

NO	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
I	INDEPENDEN	TINGKAT PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan terakhir saat diterima bekerja sebagai CPNS 2. Jenis pendidikan terakhir saat diterima bekerja sebagai CPNS 3. Pendidikan terakhir sampai dengan saat ini 4. Jenis Pendidikan terakhir sampai dengan saat ini 5. Pendidikan non formal/diklat yang pernah diikuti
II	INDEPENDEN	PENGALAMAN KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama bekerja 2. Lama bekerja pada bagian keuangan
III	INTERVENING	TINGKAT PEMAHAMAN MENGENAI SAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (sebanyak 9 pertanyaan) 2. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan (sebanyak 5 pertanyaan)

			<p>3. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi (sebanyak 4 pertanyaan)</p> <p>4. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap (sebanyak 9 pertanyaan)</p> <p>5. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan (sebanyak 5 pertanyaan)</p> <p>6. Tingkat pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban (sebanyak 4 pertanyaan)</p>
IV	DEPENDEN	IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	<p>1. Bukti transaksi</p> <p>a. Bukti penerimaan pendapatan</p> <p>b. Bukti pengelolaan belanja</p> <p>c. Bukti prosedur akuntansi aktiva</p> <p>2. Jurnal</p> <p>a. Buku jurnal pendapatan</p> <p>b. Buku jurnal penerimaan kas oleh Bendahara Pengeluaran</p> <p>c. Buku jurnal pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran</p> <p>d. Buku Jurnal Umum</p> <p>3. Posting ke buku besar</p> <p>a. Buku besar</p> <p>b. Buku besar pembantu</p> <p>4. Neraca saldo</p> <p>5. Jurnal penyesuaian</p> <p>6. Neraca saldo setelah penyesuaian</p> <p>7. Laporan keuangan</p> <p>a. Neraca</p> <p>b. Laporan realisasi Anggaran/LRA</p> <p>c. Laporan Arus Kas</p> <p>d. Catatan atas laporan keuangan</p> <p>8. Jurnal penutupan</p> <p>9. Neraca saldo setelah penutupan</p>

3.3. Pengukuran Variabel Penelitian

Setiap variabel penelitian akan dilakukan pengukuran. Variabel tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan implementasi proses akuntansi keuangan daerah diukur dengan menggunakan *category rating scale*. Skala ini dipergunakan jika peneliti ingin mendapatkan jawaban dari responden, namun responden diarahkan pada beberapa kategori/klasifikasi jawaban yang dari hasil *preliminary survey*, sekiranya mempunyai kecenderungan untuk dipilih oleh para responden (Efferin,2008:108). Menurut Sugiyono (2007:139), dalam skala model *category rating scale*, responden diarahkan untuk menjawab salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan.

Untuk variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, akan menggunakan metode tanya jawab melalui wawancara langsung dengan responden dan setiap jawaban responden akan diberikan skor antara 1 sampai dengan 5 untuk alternatif jawaban yang sudah ditentukan.

Tabel 3.2.
Penilaian Variabel Tingkat Pendidikan

VARIABEL TINGKAT PENDIDIKAN		
Indikator	Kategori	Skor
1. Pendidikan Formal pada diterima sebagai CPNS	1. < SMA/SMK/Sederajad	1
2. Pendidikan Formal terakhir sampai dengan saat ini	2. SMA/SMK/Sederajad	2
	3. DIII	3
	4. S1	4
	5. S2	5
3. Jenis Pendidikan Formal pada diterima sebagai CPNS	1. < SMA sampai SMA/SMK Non Ekonomi/Sederajad	1
4. Jenis Pendidikan Formal terakhir sampai dengan saat ini	2. SMK Kelompok Ekonomi /Bisnis/Manajemen	2
	3. D III dan S1 Non Akuntansi	3
	4. D III dan S1 Akuntansi	4
	5. S2	5
5. Mengikuti pendidikan non formal/pendidikan dan latihan (diklat) yang berkaitan dengan pengelolaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	1. Tidak Pernah	1
	2. Pernah 1 Kali	2
	3. Pernah 2 Kali	3
	4. Pernah 3 Kali	4
	5. Pernah > 3 Kali	5

Tabel 3.3.
Penilaian Variabel Pengalaman Kerja

VARIABEL TINGKAT PENDIDIKAN		
Indikator	Kategori	Skor
1. Lama bekerja	> 2 Tahun	1
2. Lama bekerja pada bagian keuangan	2 – 3 Tahun	2
	3 – 4 Tahun	3
	4 – 5 Tahun	4
	> 5 Tahun	5

Variabel implementasi proses AKD diberikan penilaian setelah melakukan wawancara dan pengamatan langsung dengan responden dalam melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Penilaian Variabel Implementasi Proses AKD

VARIABEL IMPLEMENTASI PROSES AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH		
Indikator	Kategori	Skor
<p>1. Setiap transaksi pendapatan dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan pendapatan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); dan/atau</p> <p>b. SKR; dan/atau</p> <p>c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.</p> <p>d. Surat Tanda Setoran (STS).</p> <p>e. Bukti Transfer; dan</p> <p>f. Nota Kredit Bank.</p> <p>2. Setiap transaksi pengeluaran/belanja dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja yang sah dan lengkap. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup;</p> <p>a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); atau</p> <p>b. Nota Debit Bank; atau</p> <p>c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.</p> <p>Bukti transaksi di atas dilengkapi dengan:</p> <p>a. Surat Perintah Membayar (SPM); dan/atau</p> <p>b. Surat Penyediaan Dana (SPD); dan/atau</p> <p>c. Kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.</p> <p>3. Setiap terjadi transaksi dalam prosedur</p>	<p align="center">LENGKAP</p> <p>Persyaratan:</p> <p>1. Setiap transaksi telah disertai dengan seluruh bukti-bukti transaksi dan lampiran-lampiran pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan</p> <p>2. Seluruh proses akuntansi telah dilaksanakan secara baik dan sistematis</p> <p>3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan bentuk format laporan keuangan dan lampiran pendukung telah sesuai dengan ketentuan</p>	5

<p>akuntansi aktiva dilengkapi dengan bukti-bukti memorial sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Penerimaan Barang; Berita Acara Serah Terima Barang; dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. bukti memorial dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran (pengesahan SPJ); Berita Acara Penerimaan Barang; Surat Keputusan Penghapusan Barang; Surat Pengiriman Barang; Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD); Berita Acara Pemusnahan Barang; Berita Acara Serah Terima Barang; dan Berita Acara Penilaian. <p>4. Setelah dikumpulkan bukti-bukti penerimaan pendapatan dilakukan penjurnalan dalam buku jurnal pendapatan atau pada jurnal umum</p>	<p>TIDAK LENGKAP</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap transaksi telah disertai dengan bukti-bukti dan lampiran pendukung transaksi namun masih kurang lengkap Proses akuntansi belum dilaksanakan secara keseluruhan dan tidak sistematis Bentuk format laporan keuangan dan lampiran pendukung belum sesuai dengan ketentuan 	<p>3</p>
<p>5. Setelah dikumpulkan bukti-bukti transaksi penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran dilakukan penjurnalan dalam buku jurnal penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran atau jurnal pada jurnal umum</p> <p>6. Setelah dikumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dilakukan penjurnalan dalam jurnal pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran atau pada jurnal umum</p> <p>7. Setelah transaksi dijurnal, dilakukan posting ke buku besar atau buku besar pembantu</p> <p>8. Setelah seluruh transaksi diposting ke buku besarnya dilakukan Penyusunan Neraca saldo</p> <p>9. Membuat Penyesuaian pendapatan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember yang belum diterima</p> <p>10. Membuat Penyesuaian saldo persediaan barang per 31 Desember yang belum terpakai</p> <p>11. Membuat Penyesuaian terhadap Biaya yang dibayar yang periodenya melewati tahun anggaran</p> <p>12. Membuat ayat jurnal penyesuaian</p> <p>13. penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian</p> <p>14. menyusun LRA</p> <p>15. menyusun neraca</p> <p>16. menyusun Laporan arus kas</p> <p>17. menyiapkan CALK</p> <p>18. membuat jurnal penutupan terhadap saldo pendapatan dan belanja/biaya</p> <p>19. menyusun neraca saldo setelah penutupan</p>	<p>TIDAK ADA</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap transaksi tidak disertai dengan bukti-bukti dan lampiran pendukung transaksi Tidak melaksanakan proses akuntansi Tidak menyusun laporan keuangan dan lampiran pendukung laporan keuangan 	<p>1</p>

Sedangkan untuk variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP diukur dengan 2 (dua) alternatif jawaban yaitu “Setuju” dan “Tidak Setuju”, dimana untuk pernyataan yang positif, untuk jawaban “Setuju” diberikan nilai 1 dan “Tidak Setuju” diberikan nilai 0. Sedangkan untuk pernyataan yang negatif, untuk jawaban “Setuju” diberikan nilai 0 dan “Tidak Setuju” diberikan nilai 1. Kemudian untuk semua jawaban yang benar akan diberikan penilaian sebagai berikut:

Tabel.3.5.
Penilaian Variabel Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

JAWABAN BENAR	KETERANGAN
> 80%	Sangat Paham
66% s/d 80%	Paham
51% s/d 65%	Kurang Paham
30% s/d 50 %	Tidak Paham
< 30%	Sangat Tidak Paham

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk yang ada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

3.4.2. Sampel Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada 5 (lima) SKPD dan 1 (satu)

SKPKD yaitu:

- 1) SKPD Dinas Pendidikan
- 2) SKPD Dinas Kesehatan
- 3) SKPD Dinas Pekerjaan Umum

- 4) SKPD Sekretariat Daerah
- 5) SKPD Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 6) DPPKAD selaku SKPKD

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. SKPD yang menjadi sampel penelitian adalah SKPD yang memiliki jumlah anggaran yang termasuk dalam 5 (lima) anggaran terbesar dalam APBD Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2009
2. Pegawai yang dipilih sebagai responden penelitian merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap implementasi proses akuntansi di SKPD dan SKPKD serta pernah terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada dinas tempatnya bekerja sekarang minimal satu kali.
3. Sampel penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi di SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebanyak 5 orang, staf yang membantu PPK-SKPD dalam melaksanakan akuntansi di SKPD sebanyak 5 orang dan pegawai pada DPPKAD selaku SKPKD sebanyak 10 orang. Sehingga jumlah sampel penelitian seluruhnya 20 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek dan data dokumenter (Indriantoro, 2002,145). Data subyek (*self-report data*)

penelitian ini berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden) yang diklasifikasikan dalam bentuk tanggapan (respon) berupa lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Data dokumenter penelitian ini adalah jenis data penelitian antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program.

3.5.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber asli yaitu data dari hasil pengamatan langsung dan dokumen-dokumen yang berasal dari aktifitas responden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di SKPD dan di SKPKD. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu :

a. *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan)

Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data yang mendasarkan pada informasi yang telah di dokumentasikan seperti buku-buku literatur dan laporan-laporan dan lainnya.

b. *Field Reseach* (Penelitian Lapangan)

Data yang dibutuhkan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Observasi dan Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan pengamatan dan tanya-jawab langsung antara peneliti dengan responden yang bersangkutan.

2. Angket (kuisisioner)

Dalam penelitian kuantitatif penggunaan kuisisioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data. Hasil kuisisioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel analisa, statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis langsung memberikan kuisisioner kepada responden, dimana daftar pertanyaan dikirimkan langsung kepada orang-orang yang ingin dimintai pendapatnya dan respon memilih salah satu jawaban dari sekian alternatif jawaban yang tersedia.

3.6. Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji *validity* dan *reliability* dan uji asumsi klasik.

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuisisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu instrumen. Ukuran instrumen dikatakan valid jika instrumen sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara

tepat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Kaiser dan Rice (1974), mengungkapkan data yang dapat dilakukan analisis faktor bila *Kaiser's MSA* di atas 0,5 item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,50.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Menurut Nunally (1967), instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,5.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Setelah data dikumpulkan dan diuji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Menurut Singgih (2000:47) pedoman yang dipakai dalam uji normalitas ini adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yaitu:

- Jika nilai sig atau nilai probabilitas (p) < 0,050 (taraf kepercayaan 95%), distribusi adalah tidak normal.
- Jika nilai sig atau nilai probabilitas (p) > 0,050 (taraf kepercayaan 95%), distribusi adalah normal.

2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk menguji apakah variasi kelompok populasi homogen atau tidak. Uji homogenitas menurut dilakukan dengan menggunakan uji Levene yaitu:

- Jika nilai sig atau nilai probabilitas (p) $< 0,050$ (taraf kepercayaan 95%), distribusi adalah tidak homogen.
- Jika nilai sig atau nilai probabilitas (p) $> 0,050$ (taraf kepercayaan 95%), distribusi adalah homogen

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain (Pratisto, 2004). Uji Multikolinearitas yaitu uji hubungan sesama variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka salah satu diantaranya dieliminir atau dikeluarkan dari model regresi berganda.

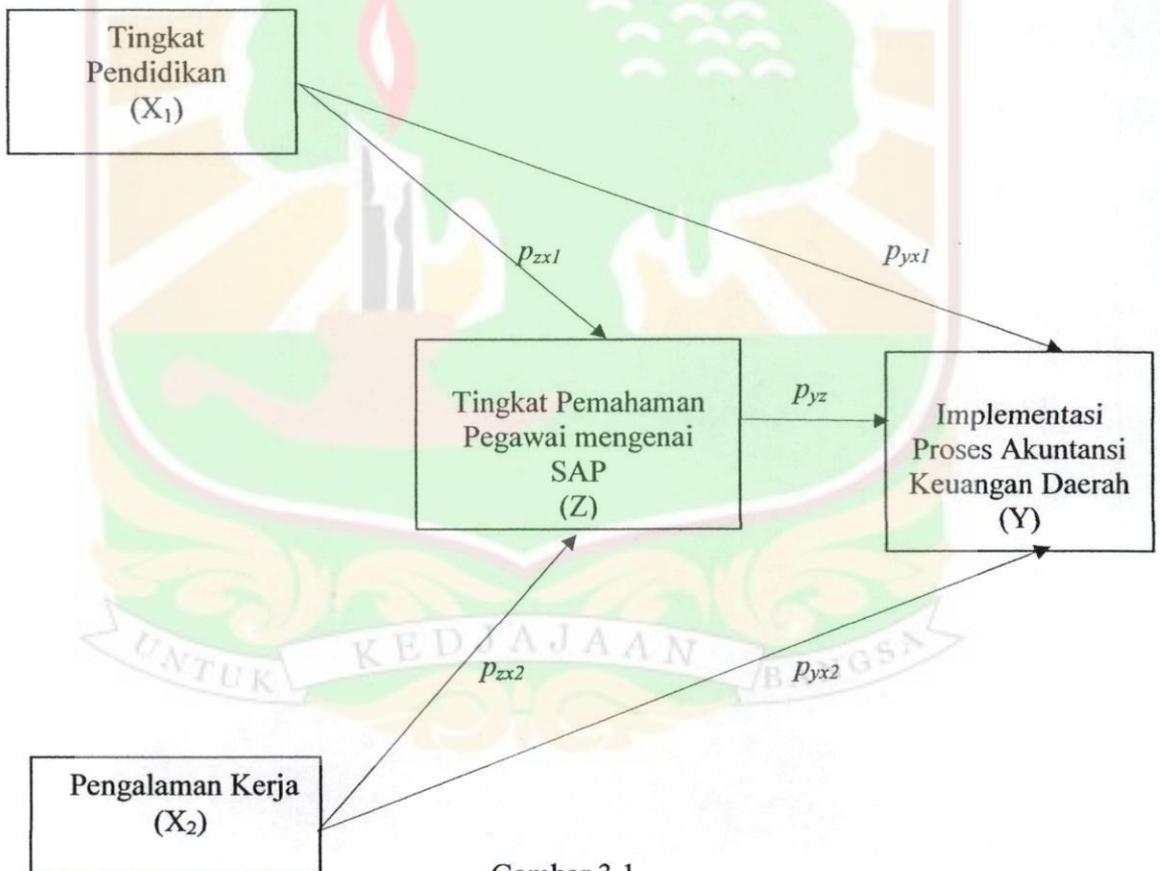
Suatu variabel dikatakan bebas dari multikolinearitas dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF > 5 , berarti terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas, maka terdapat multikolinearitas dengan tingkat kepercayaan 95%
- Jika nilai VIF < 5 , berarti tidak terdapat multikolinearitas dengan tingkat kepercayaan 95%

3.6.3. Analisa Jalur (*Path Analysis*)

Untuk menguji hipotesis penelitian, maka model yang akan penulis gunakan adalah analisa jalur (*path analysis*), untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung pada seperangkat model penyebab (variabel independen) terhadap variabel akibat (variabel dependen), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Gambar **diagram analisis jalur**, yang memperlihatkan struktur hubungan kausal antar variabel yaitu variabel penyebab dan variabel akibat, seperti gambar berikut:



Gambar 3.1.
Struktur Pengaruh Variabel Penyebab
terhadap Variabel Akibat

Persamaan struktur untuk diagram jalur di atas adalah:

$$Z = p_{zx1} X_1 + p_{zx2} X_2 + \varepsilon$$

$$Y = p_{yx1} X_1 + p_{yx2} X_2 + \varepsilon$$

$$Y = p_{yz} Z + \varepsilon$$

Dimana: X_1, X_2 = variabel independen

Z = variabel intervening

Y = variabel dependen

P_{ik} = koefisien jalur untuk setiap variabel k terhadap i

ε = galad model

- 2) Menentukan **koefisien jalur** yaitu besarnya pengaruh langsung dari sebuah variabel penyebab ke variabel akibat, dengan menghitung besarnya *standardized coefficients beta*. Pengolahan data dan analisa ini menggunakan program computer SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*).

Disamping itu juga ditentukan pengaruh tidak langsung dari sebuah variabel penyebab ke variabel akibat dengan menggunakan model sebagai berikut:

- (i) Pengaruh variabel tingkat pendidikan (X_1) terhadap variabel implementasi proses AKD (Y) melalui variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP (Z) adalah:

$$Y \longleftarrow X_1 \quad \Omega \quad Z \longrightarrow Y = p_{zx1} \cdot p_{yz}$$

- (ii) Pengaruh variabel pengalaman kerja (X_2) terhadap variabel implementasi proses AKD (Y) melalui variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP (Z) adalah:

$$Y \longleftarrow X_2 \quad \Omega \quad Z \longrightarrow Y = p_{zx2} \cdot p_{yz}$$

Sedangkan untuk mengukur pengaruh variabel lain (e) digunakan rumus:

$$p \text{ } \epsilon y = \sqrt{1 - R^2 yx_1x_2}$$

Untuk pengujian hipotesis dan pengaruh dari masing-masing variabel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Uji F (*F test*)

Digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara keseluruhan dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Apabila F_{hitung} besar dari F_{tabel} maka hipotesis secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan.

2) Uji t (*t test*)

Uji t dilakukan untuk mengetahui keberartian koefisien regresi secara parsial, dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Apabila t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} berarti secara parsial berpengaruh signifikan. Dari analisis tersebut dapat diketahui besarnya variasi perubahan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

3) R^2 (R)

Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Solok selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada pada tanggal 7 Januari 2004.

Pemerintahan Kabupaten Solok selatan saat ini dipimpin oleh:

- Bupati : Syafrizal
- Wakil Bupati : Nurfirmanwansyah

Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan hasil penetapan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005.

Untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati Solok selatan telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Solok selatan melalui Perda :

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan tanggal 11 November 2008.

Pemerintahan Kabupaten Solok selatan didukung oleh 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kec. Sangir Balai Janggo, Kec. Pauh Duo, Kec. Sangir Kec. Sungai Pagu, Kec. Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kec. Sangir Jujan dan Kec. Sangir Batang Hari, dengan luas wilayah keseluruhan 3.346,20 Km².

Kabupaten Solok selatan berada pada posisi $01^{\circ} 17' 13''$ – $01^{\circ} 46' 45''$ Lintang Selatan (LS) dan $100^{\circ} 53' 24''$ – $101^{\circ} 26' 27''$ Bujur Timur (BT). Kabupaten Solok selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan:

- ↓ Sebelah Utara dengan Kab. solok
- ↓ Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Provinsi Jambi
- ↓ Sebelah Timur dengan Kab. Dharmasraya
- ↓ Sebelah Barat dengan Kab. Pesisir selatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk tingkat kabupaten/kota diberikan otonomi berupa: penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. **Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut meliputi: 16 urusan wajib dan urusan pilihan.**

Urusan bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, kehutanan dan pariwisata.

Penyerahan urusan kepada Pemerintah Kabupaten/kota disertai dengan pendanaan dalam bentuk dana perimbangan yang dialokasikan setiap tahun. Gambaran keseluruhan Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok selatan berasal dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemerintah Pusat/Provinsi berupa: Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Propinsi ; serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Disamping itu dalam Pendapatan Daerah juga diinformasikan tentang penerimaan yang berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan, tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah dan pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah. penelitian ini juga menjelaskan secara deskriptif bagaimana tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagaimana pengalaman kerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, bagaimana tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah serta bagaimana implementasi proses akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk yang ada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Penelitian ini dilaksanakan pada 5 (lima) SKPD dan 1 (satu) SKPKD yaitu SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan, SKPD Dinas Pekerjaan Umum, SKPD Sekretariat Daerah, SKPD Pertanian, Peternakan dan Perikanan, DPPKAD selaku SKPKD

Sampel penelitian ini menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi di SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebanyak 5 orang, staf yang membantu PPK-SKPD dalam melaksanakan akuntansi di SKPD sebanyak 5 orang dan pegawai pada DPPKAD selaku SKPKD sebanyak 10 orang. Sehingga jumlah sampel penelitian seluruhnya 20 orang.

4.2.1 Deskripsi Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah menggambarkan jenis kelamin, pangkat/golongan, Jabatan, OPD/SKPD, Tingkat/ pendidikan saat diterima sebagai CPNS, pendidikan terakhir, Pendidikan dan pelatihan, dan masa kerja dibagian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang telah disebarakan sebanyak 20 kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner 100%..

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan OPD/SKPD

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan unit wilayah kerja, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Frekuensi	Persentase
1.	SKPKD	10	50
2	Pertanakan	2	10
3	Setda	2	10
4	Dinkes	2	10
5	Pendidikan	2	10
6	PU	2	10
Jumlah		20	100,0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa 10 responden (50%) berasal dari unit kerja SKPD, sedangkan sisanya untuk pertanakan, sekda, dirkes, pendidikan dan PU masing – masing 2 responden (10%)

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan atas kategori. Adapun 2 kategori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				Total	
		Laki – Laki		Perempuan		f	%
		F	%	f	%		
1	SKPKD	7	70	3	30	10	100
2	Pertanakan	1	50	1	50	2	100
3	Setda	1	50	1	50	2	100
4	Dinkes	2	100	0	0	2	100
5	Pendidikan	1	50	1	50	2	100
6	PU	2	100	0	0	2	100
Jumlah		14	70	6	30	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat 14 responden (70%) berjenis kelamin laki – laki dan 6 responden (30%) berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari masing – masing unit kerja untuk unit kerja, SKPKD Solok Selatan, terdiri dari 10 responden, terdapat 7 orang (70%) responden yang berjenis kelamin laki – laki dan 3 orang (30%) responden yang berjenis kelamin perempuan. Untuk unit kerja SKPD Pertanakan, SKPD Sekretaris Daerah, dan SKPD Dinas Pendidikan masing – masing 2 orang responden yang terdiri dari 1 orang laki – laki dan 1 orang perempuan. Sedangkan untuk unit kerja SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum masing masing 2 orang responden yang semuanya berjenis kelamin laki - laki

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Karakteristik responden berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Wilayah Kerja	Pangkat/ Golongan						Total	
		Penata/III/c		Penata Muda/III/a		Pengatur TK I/II/d			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	1	10	3	30	6	60	10	100
2	Pertanakan	0	0	2	100	0	0	2	100
3	Setda	0	0	1	50	1	50	2	100
4	Dinkes	0	0	2	100	0	0	2	100
5	Pendidikan	1	50	0	0	1	50	2	100
6	PU	0	0	2	100	0	0	2	100
	Jumlah	2	10	10	50	8	40	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk secara umum yang menjadi responden pada penelitian ini adalah pegawai yang memiliki pangkat/golongan penata muda /IIIa yaitu sebanyak 10 orang responden (50%), kemudian yang memiliki pangkat/golongan Pengatur TK I/IId sebanyak 8 orang responden (40%) dan 2 orang responden (10%) memiliki pangkat Penata /IIIc.

Dilihat masing – masing unit wilayah kerja, dari 10 orang responden yang berasal dari SKPKD Solok Selatan terdiri 1 orang responden (10%) memiliki pangkat/golongan Penata/IIIc, 3 orang responden (30%) memiliki pangkat/golongan Penata Muda/IIIa dan 6 orang responden (60%) memiliki pangka/golongan pengatur TK I/IId.

Untuk SKPD Dinas Pertanakkan, SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas PU, masing – masing terdiri dari 2 orang responden, dan seluruhnya memiliki pangkat/golongan Penata Muda/IIIa. Sedangkan untuk SKPD Sekretaris Daerah terdiri dari 1 orang yang memiliki pangkat/ golongan Penata Muda/IIIa dan 1 orang lagi memiliki pangkat/ golongan Pengatur TK I/ IId. Dan untuk SKPD Dinas Pendidikan terdiri dari 1 orang responden yang memiliki pangkat Penata/IIIc dan 1 orang lagi memiliki pangkat/ golongan Pengatur TK I/IId.

4.2.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, karakteristik responden dilihat dari 2 kelompok, yaitu kelompok pendidikan saat responden diterima sebagai CPNS dan kelompok pendidikan terakhir setelah diterima sebagai CPNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.4
Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan									
		Saat Diterima Sebagai CPNS					Setelah diterima sebagai PNS				
		SMP	SMA	D3	S1	S2	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	SKPKD				√					√	
2	SKPKD		√								√
3	SKPKD			√				√			
4	Pertanakan		√						√		
5	Pertanakan		√						√		
6	SKPKD			√				√			
7	SKPKD			√				√			
8	SKPKD			√				√			
9	Setda		√							√	
10	Setda			√				√			
11	SKPKD			√				√			
12	Dinkes		√						√		
13	Dinkes				√				√		
14	SKPKD			√				√			
15	SKPKD		√						√		
16	SKPKD		√						√		
17	Pendidikan			√				√			
18	Pendidikan				√						√
19	PU		√						√		
20	PU		√						√		
	Jumlah		9	8	3			8	10	2	

Sumber : data diolah 2010

Dari tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa dari 20 responden saat diterima sebagai CPNS terdiri dari 9 orang responden (45%) berpendidikan SMA/ sederajat, 8 orang responden (40%) berpendidikan D3 dan 3 orang responden (15%) berpendidikan S1. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS, responden yang berpendidikan D3 tetap sebanyak 8 orang (40%), responden yang berpendidikan S1 menjadi 10 orang (50%) dan responden yang berpendidikan S2 menjadi 2 orang (10%).

Tabel. 4.5

Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan tingkat pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Pendidikan saat diterima sebagai CPNS						Pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS						Total	
		SMA		D3		S1		D3		S1		S2			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	3	30	6	60	1	10	6	60	3	30	1	10	10	100
2	Pertanahan	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
3	Setda	1	50	1	50	0	0	1	50	1	50	0	0	2	100
4	Dinkes	1	50	0	0	1	100	0	0	2	100	0	0	2	100
5	Pendidikan	0	0	1	50	1	100	1	50	0	0	1	50	2	100
6	PU	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
	Jumlah	9	45	8	40	3	30	8	40	10	50	2	10	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.5 terlihat mayoritas responden saat diterima sebagai CPNS adalah berpendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang responden (45%), yang berpendidikan D3, 8 orang (40%) dan yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang (30%). Dilihat dari masing – masing unit kerja, dari 10 orang responden yang berasal dari unit kerja SKPKD Solok Selatan terdapat 3 orang responden (30%) responden berpendidikan SMA saat diterima sebagai CPNS, 6 orang responden (60%) berpendidikan D3 dan 1 orang responden (10%) berpendidikan S1. Untuk unit kerja SKPD Dinas Pertanahan dan SKPD Dinas PU masing – masing 2 orang responden, seluruhnya (100%) berpendidikan SMA. Untuk unit kerja SKPD Sekretaris Daerah dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang berpendidikan SMA dan 1 orang berpendidikan D3. Untuk unit kerja SKPD Dinas Kesehatan dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang berpendidikan SMA dan 1 orang berpendidikan S1. Dan untuk unit kerja SKPD Dinas Pendidikan dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang berpendidikan D3 dan 1 orang berpendidikan S1.

Sedangkan setelah diterima sebagai PNS di masing – masing unit kerja, sebagian besar responden melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada awal diterima sebagai CPNS sebagian besar responden berpendidikan SMA, namun setelah diterima sebagai PNS sebagian besar responden melanjutkan pendidikannya sehingga responden yang berpendidikan SMA sudah tidak ada lagi. Rata – rata responden yang semula berpendidikan SMA melanjutkan pendidikannya ke S1, dan yang semula berpendidikan S1 ada yang melanjutkan pendidikan ke S2.

Dari tabel 4.4 dapat dilihat dari 20 responden setelah diterima sebagai PNS terdiri dari 8 responden (40%) berpendidikan D3, 10 responden (50%) berpendidikan S1 dan 2 responden (10%) berpendidikan S2.

Dilihat dari masing – masing unit kerja, untuk unit kerja SKPKD terdiri dari 10 orang responden, pada saat diterima sebagai CPNS terdapat 3 orang responden yang berpendidikan SMA, setelah diterima sebagai PNS melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan yang semula 1 orang berpendidikan S1 melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 sehingga untuk unit kerja SKPKD saat ini terdapat 6 orang responden (60%) berpendidikan D3, 3 orang responden (30%) berpendidikan S1 dan 1 orang responden (10%) berpendidikan S2.

Untuk unit kerja SKPD Dinas Pertanakan dan SKPD Dinas PU yang semula saat diterima sebagai CPNS seluruhnya berpendidikan SMA, setelah diterima sebagai PNS melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sehingga seluruh responden yang berasal dari unit kerja SKPD Dinas Pertanakkan dan SKPD Dinas PU berpendidikan S1.

Untuk unit kerja SKPD Sekretaris Daerah, saat diterima sebagai CPNS terdapat 1 orang responden yang berpendidikan SMA, setelah diterima sebagai PNS melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, sehingga terdapat 1 orang berpendidikan D3 dan 1 orang berpendidikan S1

Untuk unit kerja SKPD Dinas Kesehatan, pada saat diterima sebagai CPNS terdapat 1 orang berpendidikan SMA, setelah diterima sebagai PNS melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sehingga seluruh responden yang berasal dari SKPD Dinas kesehatan 100% berpendidikan S1.

Untuk unit kerja SKPD Dinas Pendidikan, pada saat diterima sebagai CPNS terdapat 1 orang berpendidikan S1, setelah diterima sebagai PNS melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, sehingga terdapat 1 orang berpendidikan S1 dan 1 orang berpendidikan S2.

4.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan jenis pendidikan, karakteristik responden dilihat dari 2 kelompok, yaitu kelompok jenis pendidikan saat responden diterima sebagai CPNS dan kelompok jenis pendidikan terakhir setelah diterima sebagai CPNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.6

Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan									
		Saat Diterima Sebagai CPNS					Setelah diterima sebagai PNS				
		SMA/ SMK Non eko	SMK Akt	D3/S1 NAkt	D3/S1 Akt	S2	SMA/ SMK Non eko	SMK Akt	D3/S1 NAkt	D3/S1 Akt	S2
1	SKPKD				√				√		
2	SKPKD	√								√	
3	SKPKD			√				√			
4	Pertanakan		√						√		
5	Pertanakan	√							√		
6	SKPKD			√				√			
7	SKPKD			√				√			
8	SKPKD			√				√			
9	Setda		√						√		
10	Setda			√				√			
11	SKPKD			√				√			
12	Dinkes		√						√		
13	Dinkes				√				√		
14	SKPKD			√				√			
15	SKPKD		√						√		
16	SKPKD		√						√		
17	Pendidikan			√				√			
18	Pendidikan				√					√	
19	PU	√							√		
20	PU	√							√		
	Jumlah	4	5	8	3			8	10	2	

Sumber : data diolah 2010

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa berdasarkan jenis pendidikan, dari 20 responden saat diterima sebagai CPNS terdapat 4 orang responden (20%) yang berpendidikan SMA/SMK Non ekonomi, 5 orang responden (25%) yang berpendidikan SMK Ekonomi jurusan Akuntansi, 8 orang responden (40%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, dan 3 orang responden (15%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, terdapat 8 orang responden (40%) yang berpendidikan D3/S1 non

Akuntansi, 10 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi, dan 2 orang responden (10%) berpendidikan S2.

Tabel. 4.7
Tingkat Pendidikan responden saat diterima sebagai CPNS dan tingkat pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Pendidikan saat diterima sebagai CPNS								Pendidikan terakhir setelah diterima sebagai PNS						Total	
		SMA/SMK Non Eko		SMK Akt		D3/S1 Non Akt		D3/S1 Akt		D3/S1 Non Akt		D3/S1 Akt		S2			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
1	SKPKD	1	10	2	20	6	60	1	10	6	60	3	30	1	10	10	100
2	Pertanakan	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
3	Setda	0	0	1	50	1	50	0	0	1	50	1	50	0	0	2	100
4	Dinkes	0	0	1	50	0	0	1	50	0	0	2	100	0	0	2	100
5	Pendidikan	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	0	0	1	50	2	100
6	PU	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100
	Jumlah	2	10	7	35	8	40	3	15	8	40	10	50	2	10	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa untuk unit kerja SKPKD saat diterima sebagai CPNS terdiri dari 1 orang responden (10%) yang berpendidikan SMA/SMK Non Ekonomi, 2 orang responden (20%) yang berpendidikan SMK jurusan akuntansi, 6 orang responden (60%) yang berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi dan 1 orang responden (10%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini terdiri dari 6 orang responden (60%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, 3 orang responden (30%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi, dan 1 orang responden (10%) berpendidikan S2. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan dari 10 orang responden dari unit kerja SKPKD tidak ada lagi karyawan yang berpendidikan setara SMA.

Untuk unit kerja Dinas Pertanakan saat diterima sebagai CPNS dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang responden (50%) berpendidikan SMA/SMK Non Ekonomi dan 1 orang responden (50%) berpendidikan SMK jurusan Akuntansi. Dan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini terdiri dari 2 orang responden (100%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 2 orang responden yang berasal dari Unit Kerja Dinas Pertanakan seluruhnya melanjutkan jenjang pendidikan D3/S1 Akuntansi.

Untuk unit kerja sekretaris daerah, saat diterima sebagai CPNS dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang responden (50%) berpendidikan SMK jurusan akuntansi dan 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi. Dan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, dari 2 orang responden tersebut 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi dan 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 2 orang responden yang berasal dari unit kerja Sekretaris Daerah, salah satunya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak ada lagi responden yang berpendidikan setara SMA.

Untuk unit kerja Dinas Kesehatan, saat diterima sebagai CPNS dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang responden (50%) berpendidikan SMK jurusan akuntansi dan 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, dari 2 orang responden tersebut seluruhnya (100%) berpendidikan D3/S1 akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 2 orang responden yang berasal unit kerja Dinas Kesehatan, salah

satunya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak ada lagi responden yang berpendidikan setara SMA.

Untuk unit kerja Dinas Pendidikan, saat diterima sebagai CPNS dari 2 orang responden terdiri dari 1 orang (50%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, dan 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Dan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, 1 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi dan 1 orang responden (50%) berpendidikan S2. Hal ini menunjukkan bahwa dari 2 orang responden yang berasal dari Unit Kerja Dinas Pendidikan tersebut salah satunya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dan untuk unit kerja Dinas PU, saat diterima sebagai CPNS dari 2 orang responden terdiri dari 2 orang responden (100%) berpendidikan SMK jurusan akuntansi dan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, terdapat 2 orang responden (100%) berpendidikan D3/S1 akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 2 responden yang berasal dari unit kerja Dinas PU seluruhnya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak ada lagi responden yang berpendidikan setara SMA.

4.2.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan yang diikuti

Karakteristik responden berdasarkan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan
Kegiatan pendidikan dan Pelatihan yang diikuti

No	Wilayah Kerja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti								Total	
		1 x		2 x		3 x		Tidak Pernah			
		f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	4	40	3	30	1	10	2	20	10	100
2	Pertanakan	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100
3	Setda	0	0	0	0	1	50	1	50	2	100
4	Dinkes	1	50	0	0	1	50	0	0	2	100
5	Pendidikan	2	100	0	1	0	0	0	0	2	100
6	PU	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
	Jumlah	10	50	4	20	3	15	3	15	20	100

Sumber: data diolah

Dari table 4.8 terlihat bahwa dari 20 responden mayoritas 10 responden (50%) hanya mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan sebanyak 1 x, 4 responden (20%) mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan sebanyak 2 x, 3 responden (15%) mengikuti pelatihan dan pendidikan sebanyak 3 x dan masih ada yang tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan yaitu 3 orang responden (15%).

4.2.1.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu masa kerja sebagai PNS dan masa kerja pada bagian keuangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja sebagai PNS

No	Wilayah Kerja	Masa Kerja sebagai PNS								Total	
		< 2 tahun		> 5 tahun		3 – 4 tahun		4 – 5 tahun			
		f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	1	10	1	10	6	60	2	20	10	100
2	Pertanakan	0	0	1	50	1	60	0	0	2	100
3	Setda	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
4	Dinkes	1	50	0	0	1	50	0	0	2	100
5	Pendidikan	1	50	0	0	1	50	0	0	2	100
6	PU	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100
	Jumlah	3	15	3	15	9	45	5	25	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa dari 20 responden mayoritas 9 responden (45%) sudah bekerja sebagai PNS berkisar antara 3 – 4 tahun, 5 responden (25%) sudah bekerja sebagai PNS berkisar 4 – 5 tahun, dan 3 orang responden (15%) sudah bekerja sebagai PNS masing – masing < 2 tahun dan > 5 tahun.

Tabel. 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Bagian Keuangan

No	Wilayah Kerja	Masa Kerja pada Bagian Keuangan								Total	
		< 2 tahun		2-3 tahun		3-4 tahun		4-5 tahun			
		f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	3	30	3	30	4	40	0	0	10	100
2	Pertanakan	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
3	Setda	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
4	Dinkes	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
5	Pendidikan	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100
6	PU	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
	Jumlah	8	40	7	35	4	40	1	5	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa dari 20 responden mayoritas 8 responden (40%) bekerja pada bagian keuangan masih kurang dari 2 tahun, 7 responden (35%) bekerja pada bagian keuangan selama antara 2–3 tahun, 4 responden (20%) bekerja pada bagian selama 3 – 4 tahun, dan 1 orang responden (5%) sudah bekerja pada bagian keuangan selama 4 – 5 tahun.

4.2.1.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Mengenai SAP

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran									Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	SKPKD	1	1	1	1	0	1	0	1	1	7	78	P
2	SKPKD	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	67	P
3	SKPKD	1	0	1	1	1	1	1	1	0	7	78	P
4	Pertanakan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	22	STP
5	Pertanakan	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	56	KP
6	SKPKD	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	56	KP
7	SKPKD	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	44	TP
8	SKPKD	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	33	TP
9	Setda	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5	56	KP
10	Setda	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	22	STP
11	SKPKD	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	44	TP
12	Dinkes	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	44	TP
13	Dinkes	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	44	TP
14	SKPKD	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	33	TP
15	SKPKD	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	33	TP
16	SKPKD	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5	56	KP
17	Pendidikan	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	33	TP
18	Pendidikan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	78	P
19	PU	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	44	TP
20	PU	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	44	TP
	Rata-rata										4	44	TP

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP), 66%-80% = Paham (P), 51%-65% = Kurang Paham (KP), 30%-50% = Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah 4 (44%). Hal ini berarti bahwa

rata-rata semua responden masih tidak memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 orang responden (20%) yang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, 4 orang responden (20%) yang masih kurang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, 10 orang yang tidak memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan 2 orang yang sangat tidak memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, untuk SKPKD, dari 10 orang responden terdapat 3 orang responden (30%) yang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, 2 responden (20%) orang yang kurang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan 5 orang responden (50%) yang tidak memahami tentang PSAP No. 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Untuk SKPD Dinas Pertanakaan dan Sekretaris Daerah, dari 2 orang responden terdapat 1 orang responden (50%) yang kurang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan 1 orang responden (50%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pada SKPD Dinas Pendidikan, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden yang memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan 1 orang responden yang tidak memahami PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan dari SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas PU, dari 2 orang responden, 100% responden masih tidak memahami mengenai PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 4.12
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 05 tentang
Akuntansi Persediaan

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan					Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4	5			
1	SKPKD	1	1	0	0	1	3	60	KP
2	SKPKD	1	1	1	0	0	3	60	KP
3	SKPKD	0	1	0	1	1	3	60	KP
4	Pertanakan	0	0	1	0	0	1	20	STP
5	Pertanakan	0	1	1	0	0	2	40	TP
6	SKPKD	0	1	1	0	0	2	40	TP
7	SKPKD	0	1	0	0	0	1	20	STP
8	SKPKD	0	1	1	0	1	3	60	KP
9	Setda	1	1	1	1	1	5	100	SP
10	Setda	0	1	0	0	1	2	40	TP
11	SKPKD	0	0	1	1	0	2	40	TP
12	Dinkes	1	1	1	1	1	5	100	SP
13	Dinkes	0	1	1	1	0	3	60	KP
14	SKPKD	1	0	0	0	0	1	20	STP
15	SKPKD	0	0	0	1	0	1	20	STP
16	SKPKD	0	1	1	0	1	3	60	KP
17	Pendidikan	0	0	1	0	0	1	20	STP
18	Pendidikan	1	1	1	1	1	5	100	SP
19	PU	1	1	1	0	1	4	80	P
20	PU	0	1	1	0	0	2	40	TP
	Rata-rata						2.6	52	KP

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP) , 66%-80% = Paham (P), 51%-65%= Kurang Paham (KP), 30%-50%= Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan adalah 2,6 (52%). Hal ini berarti bahwa rata-rata semua responden masih kurang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 orang responden (15%) yang sangat memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi

Persediaan, 1 orang responden (5%) yang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 6 orang responden (30%) yang kurang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 5 orang responden (25%) yang tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan dan 5 orang responden (25%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, untuk SKPKD dari 10 orang responden terdapat 5 orang responden (50%) yang masih kurang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 2 orang responden (20%) yang tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan dan 3 orang responden (30%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan. Untuk SKPD Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dari 2 orang responden, masing-masing terdapat 1 orang responden (50%) yang sangat memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 1 orang responden (50%) pada SKPD Dinas Kesehatan yang kurang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, 1 orang responden (50%) pada SKPD Sekretariat Daerah yang tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan dan 1 orang responden (50%) pada SKPD Dinas Pendidikan yang sangat tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan. Untuk SKPD Dinas Pertanian, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan dan 1 orang responden (50%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sedangkan untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi

Persediaan dan 1 orang responden (50%) yang tidak memahami PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Tabel 4.13
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi				Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4			
1	SKPKD	1	1	0	0	2	50	TP
2	SKPKD	0	1	1	0	2	50	TP
3	SKPKD	0	1	0	0	1	25	STP
4	Pertanakan	0	1	0	0	1	25	STP
5	Pertanakan	1	1	1	1	4	100	SP
6	SKPKD	1	1	1	1	4	100	SP
7	SKPKD	0	1	1	1	3	75	P
8	SKPKD	1	1	1	0	3	75	P
9	Setda	1	1	1	1	4	100	SP
10	Setda	0	0	1	1	2	50	TP
11	SKPKD	0	0	1	1	2	50	TP
12	Dinkes	1	0	0	0	1	25	STP
13	Dinkes	0	1	1	1	3	75	P
14	SKPKD	0	1	1	1	3	75	P
15	SKPKD	0	1	1	0	2	50	TP
16	SKPKD	0	1	1	0	2	50	TP
17	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	STP
18	Pendidikan	1	1	0	0	2	50	TP
19	PU	1	0	1	1	3	75	P
20	PU	0	0	0	0	0	0	STP
	Rata-rata					2,2	55	KP

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP) , 66%-80% = Paham (P), 51%-65%= Kurang Paham (KP), 30%-50%= Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi adalah 2,2 (55%). Hal ini berarti bahwa rata-rata semua responden masih kurang memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 orang responden (15%) yang sangat memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, 5 orang responden (25%) yang memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, 7 orang responden (35%) yang tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, dan 5 orang responden (25%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi .

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, untuk SKPKD, dari 10 orang responden, terdapat 1 orang responden (10%) yang sangat memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, 3 orang responden (30%) yang memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, 5 orang responden (50%) yang tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi dan 1 orang responden (10%) masih sangat tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi. Untuk SKPD Dinas Pertanakan dan Sekretariat Daerah, masing – masing dari 2 orang responden terdapat 1 orang responden (50%) yang sangat memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi dan 1 orang responden (50%) pada SKPD Pertanakan yang masih sangat tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi dan 1 orang responden (50%) pada SKPD Sekretariat Daerah yang tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi . Untuk SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, masing – masing dari 2 orang responden terdapat 1 orang responden (50%) yang memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi dan 1 orang responden (50%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) tidak memahami dan 1

orang responden (50%) sangat tidak memahami PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi.

Tabel 4.14
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap									Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	SKPKD	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7	78	P
2	SKPKD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	89	SP	
3	SKPKD	1	1	0	1	0	1	1	0	0	5	56	KP	
4	Pertanakan	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	44	TP	
5	Pertanakan	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	56	KP	
6	SKPKD	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	44	TP	
7	SKPKD	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5	56	KP	
8	SKPKD	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	44	TP	
9	Seda	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5	56	KP	
10	Seda	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7	78	P	
11	SKPKD	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	44	TP	
12	Dinkes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	22	STP	
13	Dinkes	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	56	KP	
14	SKPKD	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	44	TP	
15	SKPKD	1	0	1	0	0	1	0	1	1	5	56	KP	
16	SKPKD	0	1	1	1	0	1	1	1	0	6	67	P	
17	Pendidikan	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5	56	KP	
18	Pendidikan	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	56	KP	
19	PU	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	78	P	
20	PU	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	44	TP	
	Rata-rata										5,1	57	KP	

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP), 66%-80% = Paham (P), 51%-65% = Kurang Paham (KP), 30%-50% = Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)
Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap adalah 5,1 (57%). Hal ini berarti bahwa rata-rata semua responden masih kurang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 orang responden (5%) yang sangat memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 4 orang responden (20%) yang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 8 orang responden (40%) yang kurang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 6 orang responden (30%) yang tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan 1 orang responden (5%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, SKPKD dari 10 orang responden terdapat 1 orang responden (10%) yang sangat memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 2 orang responden (20%) yang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 3 orang responden (30%) yang kurang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan 4 orang responden (40%) yang tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Untuk SKPD Dinas Pertanahan, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang kurang memahami dan 1 orang responden yang tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Untuk SKPD Sekretariat Daerah, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang memahami dan 1 orang responden yang kurang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Untuk SKPD Dinas Kesehatan, dari 2 orang responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang kurang memahami dan 1 orang responden yang sangat tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Untuk SKPD Dinas Pendidikan, dari 2 orang responden, 100% responden kurang memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Sedangkan SKPD Dinas

PU, dari 2 orang responden, 1 orang responden (50%) memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan 1 orang responden (50%) yang tidak memahami PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Tabel 4.15
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan					Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4	5			
1	SKPKD	0	0	1	1	0	2	40	TP
2	SKPKD	1	1	1	1	1	5	100	SP
3	SKPKD	1	1	1	1	1	5	100	SP
4	Pertanakan	1	0	0	0	0	1	20	STP
5	Pertanakan	1	1	1	1	1	5	100	SP
6	SKPKD	1	1	1	1	0	4	80	P
7	SKPKD	0	0	0	0	0	0	0	STP
8	SKPKD	0	1	1	1	0	3	60	KP
9	Setda	0	1	1	1	0	3	60	KP
10	Setda	1	1	0	1	1	4	80	P
11	SKPKD	0	0	1	1	1	3	60	KP
12	Dinkes	0	1	1	1	0	3	60	KP
13	Dinkes	1	1	1	1	0	4	80	P
14	SKPKD	0	1	1	1	0	3	60	KP
15	SKPKD	0	0	0	0	1	1	20	STP
16	SKPKD	0	1	1	1	0	3	60	KP
17	Pendidikan	1	1	0	1	0	3	60	KP
18	Pendidikan	0	1	1	1	1	4	80	P
19	PU	0	1	0	0	0	1	20	STP
20	PU	0	1	1	1	0	3	60	KP
	Rata-rata						3	60	KP

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP) , 66%-80% = Paham (P), 51%-65%= Kurang Paham (KP), 30%-50%= Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan adalah 3 (60%). Hal ini berarti bahwa rata-rata semua responden masih kurang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 orang responden (15%) yang sangat memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 4 orang responden (20%) yang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 8 orang responden (40%) yang kurang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 1 orang responden (5%) yang tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan 4 orang responden (20%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, SKPKD dari 10 orang responden terdapat 2 orang responden (20%) yang sangat memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 1 orang responden (10%) yang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 4 orang responden (40%) yang kurang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, 1 orang responden (10%) yang tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan 2 orang responden (20%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Untuk SKPD Dinas Pertanian, dari 2 orang

responden, terdapat 1 orang responden (50%) yang sangat memahami dan 1 orang responden yang sangat tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Untuk SKPD Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dari 2 orang responden, masing-masing terdapat 1 orang responden (50%) yang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan masing-masing 1 orang responden yang kurang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan untuk SKPD Dinas PU, dari 2 orang responden, 1 orang responden (50%) masih kurang memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan 1 orang responden (50%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tabel 4.16
Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 09
tentang Akuntansi Kewajiban

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban				Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4			
1	SKPKD	1	0	1	1	3	75	P
2	SKPKD	0	0	1	1	2	50	TP
3	SKPKD	0	0	0	1	1	25	STP
4	Pertanakan	0	1	1	1	3	75	P
5	Pertanakan	0	1	1	1	3	75	P
6	SKPKD	0	1	1	1	3	75	P
7	SKPKD	1	0	0	0	1	25	STP
8	SKPKD	0	1	1	0	2	50	TP
9	Setda	0	1	1	1	3	75	P
10	Setda	0	0	1	0	1	25	STP
11	SKPKD	1	1	1	1	4	100	SP
12	Dinkes	1	1	0	1	3	75	P
13	Dinkes	1	0	1	1	3	75	P
14	SKPKD	1	1	1	1	4	100	SP
15	SKPKD	1	0	1	1	3	75	P
16	SKPKD	1	0	0	0	1	25	STP
17	Pendidikan	0	0	0	1	1	25	STP

No	Responden	Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban				Jmlh Jwbn yang benar	% Jwbn yang benar	Ket
		1	2	3	4			
18	Pendidikan	1	1	0	1	3	75	P
19	PU	1	0	0	0	1	25	STP
20	PU	0	1	1	1	3	75	P
	Rata-rata					2,4	60	KP

Ket : > 80% = Sangat Paham (SP) , 66%-80% = Paham (P), 51%-65%= Kurang Paham (KP), 30%-50%= Tidak Paham (TP), dan < 30% = Sangat Tidak Paham (STP)

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang responden yang diteliti, rata-rata jawaban yang benar dari semua responden mengenai PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban adalah 2,4 (60%). Hal ini berarti bahwa rata-rata semua responden masih kurang memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, juga dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 orang responden (10%) yang sangat memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 10 orang responden (50%) yang memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 2 orang responden (10%) yang tidak memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, dan 6 orang responden (30%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban.

Dilihat dari masing-masing SKPKD dan SKPD, SKPKD dari 10 orang responden terdapat 2 orang responden (20%) yang sangat memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 3 orang responden (30%) yang memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 2 orang responden (40%) yang tidak memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, dan 3 orang responden (30%) yang sangat tidak memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban. Untuk SKPD Dinas Pertanakan dan Dinas Kesehatan, dari 2 orang responden per

SKPD, masing-masing 100% responden memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban. Sedangkan untuk SKPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas PU, dari 2 orang responden per SKPD, masing-masing terdapat 1 orang responden (50%) yang memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban dan masing-masing 1 orang responden yang sangat tidak memahami PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban.

Tabel. 4.17
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai
Mengenai SAP per unit kerja

No	Unit Kerja	Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP										Total	
		Sangat Tidak Paham (< 30%)		Tidak Paham (30%-50%)		Kurang Paham (51%-65%)		Paham (66%-80%)		Paham (>80%)			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	SKPKD	0	0	2	20	4	40	3	30	1	10	10	100
2	Pertanakan	0	0	1	50	0	0	1	50	0	0	2	100
3	Setda	0	0	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
4	Dinkes	0	0	0	0	1	50	1	50	0	0	2	100
5	Pendidikan	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	2	100
6	PU	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	2	100
	Jumlah	1	5	4	20	8	40	5	25	2	10	20	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.17 terlihat bahwa dari 20 orang responden, mayoritas 8 orang responden (40%) masih kurang paham mengenai SAP, 5 orang responden (25%) paham mengenai SAP, 4 orang responden (20%) tidak paham mengenai SAP, 2 responden (10%) sangat paham mengenai SAP dan 1 orang responden (5%) sangat tidak paham mengenai SAP.

4.1.2.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Implementasi Proses AKD

Karakteristik responden berdasarkan Implementasi Proses AKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Karakteristik Responden Berdasarkan Implementasi Proses AKD

No	Implementasi Proses AKD	Pelaksanaan Proses AKD						Total	
		Lengkap		Tidak Lengkap		Tidak Ada		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1	Bukti Transaksi	20	100	0	0	0	0	20	100
2	Jurnal	0	0	10	50	10	50	20	100
3	Posting Ke Buku Besar	0	0	0	0	20	100	20	100
4	Neraca Saldo	0	0	0	0	20	100	20	100
5	Jurnal Penyesuaian	0	0	0	0	20	100	20	100
6	Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	0	0	0	0	20	100	20	100
7	Laporan Keuangan	0	0	20	100	0	0	20	100
8	Jurnal Penutup	0	0	0	0	20	0	20	100
9	Neraca Saldo Setelah Penutupan	0	0	0	0	20	0	20	100

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa pelaksanaan proses Akuntansi Keuangan Daerah dalam hal kelengkapan bukti – bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh masing – masing unit kinerja yang terdiri dari SKPKD, Dinas Pertanakan, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU 100% dilakukan secara lengkap. Untuk penjurnalan, dari 6 (enam) unit kerja , 50% dilaksanakan namun tidak lengkap, dan 50% lagi tidak dilaksanakan sama sekali. Dan untuk pelaksanaan posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian 100 % tidak dilakukan oleh keenam unit kerja tersebut. Begitu pula halnya dengan pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sedangkan pembuatan Laporan Keuangan seluruh unit kerja (100%) melakukannya namun tidak secara lengkap.

4.2.2 Pengujian Instrumen

4.2.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu instrumen. Ukuran instrumen dikatakan valid jika instrumen sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Logika pengujian adalah jika sebuah variabel memang mempunyai kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya dengan korelasi yang lemah dengan variabel lain cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu.

Kaiser dan Rice (1974), mengungkapkan data yang dapat dilakukan analisis faktor bila *Kaiser's MSA* di atas 0,5 item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,50.

Tabel 4.19

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.740
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	34.832
	df	6
	Sig.	.000

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas diperoleh nilai KMO dan Bartletts test sebesar 0.740 dengan signifikansi 0.000. Oleh karena angka tersebut sudah diatas 0,5 dan signifikansi jauh dibawah 0,05 ($0.000 < 0,05$) maka variabel dan sampel yang sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut

Tabe 4.20

Anti-image Matrices

		Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Tingkat Pemahaman
Anti-image Covariance	Implementasi AKD	.325	-.150	-.194	-.120
	Tingkat Pendidikan	-.150	.517	.130	-.170
	Pengalaman Kerja	-.194	.130	.493	-.118
	Tingkat Pemahaman	-.120	-.170	-.118	.380
Anti-image Correlation	Implementasi AKD	.737 ^a	-.366	-.486	-.342
	Tingkat Pendidikan	-.366	.715 ^a	.257	-.384
	Pengalaman Kerja	-.486	.257	.705 ^a	-.273
	Tingkat Pemahaman	-.342	-.384	-.273	.791 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : Data diolah 2010

Dari tabel *anti image matrices correlation*, terlihat semua angka MSA (*angka dengan huruf a*) bernilai diatas 0,5. Masing – masing variable yang diuji memiliki nilai MSA sebagai berikut : untuk implementasi AKD sebesar 0.737, tingkat pendidikan 0.715, pengalaman kerja 0.705, dan tingkat pemahaman 0.791. Dengan demikian keempat variabel yang diuji dinyatakan valid dan dapat dilakukan proses analisis selanjutnya.

Tabel 4.21

Communalities

	Initial	Extraction
Implementasi AKD	1.000	.854
Tingkat Pendidikan	1.000	.969
Pengalaman Kerja	1.000	.948
Tingkat Pemahaman	1.000	.998

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber : Data diolah 2010

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel implementasi AKD diperoleh angka sebesar 0.854. Hal ini berarti 85.4% varian implementasi AKD dapat dijelaskan oleh factor yang terbentuk. Untuk variabel tingkat pendidikan diperoleh angka sebesar 0.969, hal ini berarti 96.9% varian tingkat pendidikan dapat dijelaskan oleh factor yang terbentuk. Untuk variabel pengalaman kerja diperoleh angka sebesar 0.948, hal ini berarti 94.8% varian pengalaman kerja dapat dijelaskan oleh factor yang terbentuk. Dan untuk tingkat pemahaman mengenai SAP diperoleh angka sebesar 0.998. Hal ini berarti 99.8% varian tingkat pemahaman dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

Tabel 4.22
Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Implementasi AKD	.912	-.068	.133
Tingkat Pendidikan	.759	.590	.212
Pengalaman Kerja	.768	-.580	.149
Tingkat Pemahaman	.892	.066	-.444

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Sumber : data diolah 2010

Tabel *component matrix* menunjukkan distribusi keempat variabel pada 3 faktor yang terbentuk. Sedangkan angka – angka pada tabel merupakan factor loading yang menunjukkan besar korelasi antara satu variabel dengan faktor 1, faktor 2 atau faktor 3. Dari tabel dapat dilihat keempat komponen yang diuji memiliki factor loading yang lebih besar dari 0,5. Dengan demikian implementasi AKD, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman termasuk dalam faktor 1.

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan dengan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat diterima bila memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0,60 seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2005) dan Suyuti (2005).

Untuk menentukan reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan variabel dilakukan pengujian dengan komputer program SPSS 15.0. for windows dengan rumus *Skala Alpha Cronbach*.

Untuk mengetahui syarat tingkat reliabel suatu instrumen penelitian juga dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.23
Tingkat Reliabilitas

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0.00-0.20	Kurang reliabel
>0.20-0.40	Agak reliabel
>0.40-0.60	Cukup reliabel
>0.60-0.80	Reliabel
>0.80-1.00	Sangat reliabel

Sumber : Triton PB (2005)

Berdasarkan tingkat reliabilitas, hasil uji koefisien reliabilitas (r Alpha) terhadap keempat instrumen variabel yang diuji dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.24
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Ket
Implementasi AKD	0.725	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0.617	Reliabel
Pengalaman Kerja	0.568	Cukup Reliabel
Tingkat Pemahaman	0.403	Cukup Reliabel

Sumber : hasil olahan data

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, nilai alpha cronbach untuk implementasi AKD adalah 0.725, tingkat pendidikan adalah 0.617, pengalaman kerja 0.568 dan tingkat pemahaman adalah 0.403. Hal ini berarti bahwa konstruk pernyataan untuk variabel implementasi AKD dan tingkat pendidikan sudah handal/ reliabel sedangkan konstruk pernyataan untuk pengalaman kerja dan tingkat pemahaman sudah cukup reliabel, seperti yang dikemukakan oleh Triton (2005).

4.2.2.2 Uji Normalitas

Sujianto (2006) menjelaskan bahwa uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Santoso (2006) mengatakan bahwa uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik diterapkan.

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Imam Ghozali (2000) mengemukakan bahwa uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik normal plot dimana jika titik – titik menyebar

disekitar dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi normal. Selain dengan menggunakan grafik normal P-P Plot, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov, yaitu menguji nilai normalitas masing – masing variabel dimana jika nilai Asymp sign > 0,05, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal, sedangkan sebaliknya jika asymp Sign < 0,05 maka data disimpulkan tidak terdistribusi normal

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan terhadap penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.25
Uji Normalitas Kolmogorow-Smirnov

No.	Variabel	Sign	Keterangan
1.	Implementasi AKD	0.301	Normal
2.	Tingkat Pendidikan	0.095	Normal
3.	Pengalaman Kerja	0.902	Normal
4	Tingkat Pemahaman	0.206	Normal

Sumber : hasil olahan data (2010)

Dari hasil pengujian yang dilakukan, terlihat nilai signifikansi untuk implementasi AKD sebesar 0.301, tingkat pendidikan 0.095, pengalaman kerja 0.902 dan tingkat pemahaman mengenai SAP 0.206. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada keempat variabel tersebut terdistribusi normal.

4.2.2.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Sebagai kriteria pengujian jika nilai signifikansi

lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

Tabel 4.26
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Implementasi AKD	1.169	5	14	.372
Tingkat Pendidikan	1.113	5	14	.397
Pengalaman Kerja	1.844	5	14	.169
Tingkat Pemahaman	.845	5	14	.540

Sumber : Data diolah 2010

Dari tabel hasil uji homogenitas diatas, diketahui nilai signifikansi untuk implementasi AKD adalah sebesar 0.372, tingkat pendidikan 0.397, pengalaman kerja 0.169, tingkat pemahaman 0.540. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa keenam kelompok data implementasi AKD, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman mengenai SAP berdasarkan OPD/SKDP mempunyai varian yang sama. Angka levene statistic menunjukkan semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya.

4.2.2.4 Uji Multikolinearitas

Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka salah satu diantaranya dieliminir atau dikeluarkan dari model regresi berganda.

Suatu variabel dikatakan bebas dari multikolinearitas dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF > 5 , berarti terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas, maka terdapat multikolinearitas dengan tingkat kepercayaan 95%

- Jika nilai VIF < 5, berarti tidak terdapat multikolinieritas dengan tingkat kepercayaan 95%

Tabel 4.27
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan	0.673	1.487	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Pengalaman Kerja	0.673	1.487	Tidak Terjadi Multikolinieritas
2	Tingkat Pendidikan	0.264	3.791	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Pengalaman Kerja	0.332	3.009	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	Tingkat Pemahaman	0.373	2.683	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : data diolah

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF terletak disekitar angka 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinier antar tingkat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai variabel independen serta variabel tingkat pemahaman SAP sebagai variabel intervening.

4.2.3 Analisa Regresi Berganda

4.2.3.1 Analisa Persamaan Regresi Berganda Model 1

Analisa regresi model 1 ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian dengan menggunakan model regresi dengan

menggunakan SPSS for window versi 15. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.28
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Nilai t hitung	Sign	Keterangan
Konstanta	0.961			
Tingkat Pendidikan	0.168	3.892	0.001	Signifikan
Pengalaman Kerja	0.062	2.919	0.010	Signifikan
R	0.695		Fhitung	7.929
R ²	0.483		Prob	0.004
T Tabel	2.110		F Tabel	3.592

Sumber : Data Diolah dan Lampiran

Dari hasil analisa regresi diperoleh persamaan regresi model 1 sebagai berikut :

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 \Rightarrow y = 0.961 + 0.168x_1 + 0.062x_2$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0.961 mengindikasikan bahwa jika tidak ada variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja maka implementasi proses AKD adalah sebesar 0.961

Nilai Koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan sebesar 0.168 menunjukkan bahwa jika variabel pengalaman kerja nilainya tetap dan setiap nilai tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.168. Koefisien regresi tingkat pendidikan bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan implementasi proses AKD, dimana *semakin naik tingkat pendidikan maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.*

Nilai koefisien korelasi variabel pengalaman kerja sebesar 0.062 menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pendidikan nilainya tetap dan setiap nilai pengalaman kerja mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.062. Koefisien regresi pengalaman kerja bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD, dimana *semakin banyak pengalaman kerja seorang pegawai maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.*

Dilihat dari uji anova atau Uji F, nilai f hitung diperoleh sebesar 7.929 pada derajat bebas ($df = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17$, dimana $n =$ jumlah sampel, dan $k =$ jumlah variabel independen, nilai f tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 3.592. Dengan demikian $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 0.004 ($sign < 0,05$). Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama – sama, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap implementasi proses AKD.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.695 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,483 artinya 48.3% dari variasi implementasi proses AKD bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,517 atau 51.7% ($1 - 0,483$ atau $100\% - 48.3\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model.

4.2.3.2 Analisa Persamaan Model Regresi Berganda Model II

Analisa regresi model II digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP

Untuk mengestimasi parameter atau koefisien regresi digunakan sistem pengolahan data dengan bantuan program SPSS 15 yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.29
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Nilai t hitung	Sign	Keterangan
Konstanta	-4.447			
Tingkat Pendidikan	1.959	5.133	0.000	Signifikan
Pengalaman Kerja	0.784	4.172	0.001	Signifikan
R	0.792		Fhitung	14.309
R ²	0.627		Prob	0.000
T Tabel	2.110		F Tabel	3.592

Sumber : Data Diolah dan Lampiran

Dari hasil analisa regresi diperoleh persamaan regresi model 2 sebagai berikut :

$$z = a + b_1x_1 + b_2x_2 \Rightarrow z = -4.447 + 1.959x_1 + 0.784x_2$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -4.447 mengindikasikan bahwa jika variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja nilainya tetap maka nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebesar - 4.447 atau tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP turun sebesar 4.447

Nilai Koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan sebesar 1.959 menunjukkan bahwa jika variabel pengalaman kerja nilainya tetap dan setiap nilai tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP akan meningkat sebesar 1.959. Koefisien regresi tingkat pendidikan bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP, dimana *semakin naik tingkat pendidikan maka semakin meningkat tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.*

Nilai koefisien korelasi variabel pengalaman kerja sebesar sebesar 0.784 menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pendidikan nilainya tetap dan setiap nilai pengalaman kerja mengalami peningkatan, maka tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP akan meningkat sebesar 0.784. Koefisien regresi pengalaman kerja bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pengalaman kerja dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP, dimana *semakin banyak pengalaman kerja seorang pegawai maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.*

Dilihat dari uji anova atau Uji F, nilai f hitung diperoleh sebesar 14.309 pada derajat bebas ($df = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17$), dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai F tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 3.592. dengan demikian $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($\text{sig} < 0,05$). Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama – sama, tingkat pendidikan dan

pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,627 artinya 62.7% dari variasi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,373 atau 37.3% ($1-0,627$ atau $100\%-627\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model.

4.2.3.3 Analisa Persamaan Regresi Sederhana Model III

Analisa regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP terhadap variabel terikat (*dependen*) yaitu implementasi proses AKD.

Tabel 4.30
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP terhadap implementasi proses AKD

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Nilai t hitung	Sign	Keterangan
Konstanta	1.418			
Tingkat Pemahaman pegawai mengenai SAP	0.059	3.298	0.004	Signifikan
R	0.614		Fhitung	10.878
R^2	0.377		Prob	0.004
T Tabel	2.101		F Tabel	4.414

Sumber : Data Diolah dan Lampiran

Dari hasil analisa regresi diperoleh persamaan regresi model 3 sebagai berikut :

$$y = a + b_z \Rightarrow y = 1.418 + 0.059z$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 1.418 mengindikasikan bahwa jika nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP adalah tetap nilai maka implementasi proses AKD adalah sebesar 1.418

Nilai Koefisien korelasi variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebesar 0.059 menunjukkan bahwa setiap nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.059. Koefisien regresi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara tingkat tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dengan implementasi proses AKD, dimana *semakin tinggi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.*

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.614 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dengan implementasi proses AKD. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,377 artinya 37.7% dari variasi implementasi proses AKD bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,623 atau 62.3% ($1-0,377$ atau $100\%-37.7\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model.

4.2.4 Pengujian Hipotesa

4.2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.28 diperoleh nilai t hitung untuk tingkat pendidikan sebesar 3.892 pada derajat bebas ($df = n-k-1 = 20-2-1 = 17$), dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.110 dengan demikian $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($\text{sig} < 0,05$). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *H1 diterima*, artinya *tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi proses AKD.*

4.2.4.2 Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.28 diperoleh nilai t hitung untuk pengalaman kerja diperoleh sebesar 2.919 pada derajat bebas ($df = n-k-1 = 20-2-1 = 17$), dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.110 dengan demikian $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 0,010 ($\text{sig} < 0,05$). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *H2 diterima*, artinya *pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi proses AKD.*

4.2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Dari hasil analisis regresi tabel 4.29 diperoleh nilai t hitung untuk tingkat pendidikan sebesar 5.133 pada derajat bebas ($df = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17$), dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.110 dengan demikian T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($sig < 0,05$). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *H3 diterima*, artinya *tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.*

4.2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Dari hasil analisis regresi tabel 4.29 diperoleh nilai t hitung untuk pengalaman kerja diperoleh sebesar 4.172 pada derajat bebas ($df = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17$), dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.110 dengan demikian T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($sig < 0,05$). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *H4 diterima*, artinya *pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.*

4.2.4.5 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP Terhadap Implementasi Proses AKD

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.31 diperoleh nilai t hitung untuk tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP adalah sebesar 3.298 pada derajat bebas (df) = $n-k-1 = 20-2-1 = 17$, dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.101 dan f hitung sebesar 10.878 > f tabel 4.414 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($\text{sig} < 0,05$). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *H5 diterima*, artinya *tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi proses AKD*.

4.2.4.6 Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP Sebagai Intervening

Untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses akuntansi keuangan daerah melalui tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening dilakukan analisa regresi bertingkat atau analisis jalur. Analisis ini dilakukan untuk melihat besar pengaruh langsung dan tidak langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen melalui suatu variabel perantara/mediasi atau intervening

Analisis pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan pengaruh total (*total effects*) antar variabel dalam model, digunakan untuk membandingkan besarnya pengaruh setiap konstruk variabel. Pengaruh langsung adalah koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah

satu ujung, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara (intervening variabel) sedangkan pengaruh total adalah pengaruh dari berbagai hubungan (Ferdinand, 2002 : 179).

Rangkuman hasil analisa regresi bertingkat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

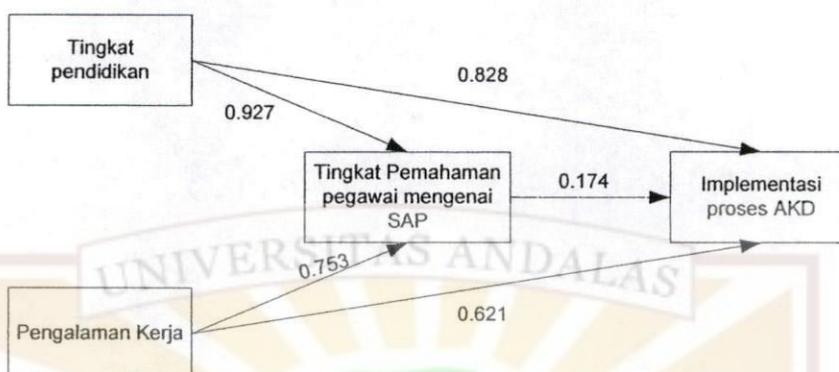
Tabel 4 .31
Hasil analisa regresi bertingkat

Varaibel Independen	Variabel Dependent	Kocfisien jalur			Perbandingan	Keterangan
		Direct	Indirect	Total		
Tingkat pendidikan	Implementasi proses AKD	0.828	0.161	0.989	TE > DE	Diterima
Tingkat Pendidikan	Tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP	0.927	0.000	0.927	TE = DE	Diterima
Pengalaman kerja	Implementasi proses AKD	0.621	0.085	0.706	TE > DE	Diterima
Pengalaman kerja	Tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP	0.753	0.000	0.753	TE = DE	Diterima
Tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP	Implementasi proses AKD	0.174	0.000	0.174	TE = DE	Diterima

Sumber : Data diolah (2009)

Berdasarkan rangkuman hasil analisa jalur diatas untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada model persamaan struktural sebagai berikut :

Gambar 4.2
Model Persamaan Struktural



Berdasarkan rangkuman hasil analisa jalur pada tabel (4.31) dan model persamaan struktural (gambar 4.1) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Persamaan 1 :

$$z = p_{zx1} X_1 + p_{zx2} X_2$$

$$z = 0.927 X_1 + 0.753 X_2$$

(0.000) (0.001)

Persamaan 2 : (Pengaruh Langsung)

$$y = 0.828X_1 + 0.621 X_2$$

(0.000) (0.002)

Persamaan 3 : (Pengaruh Tidak Langsung)

$$y = p_{zx1} X_1 + p_{zx2} X_2 + p_{zy} Z$$

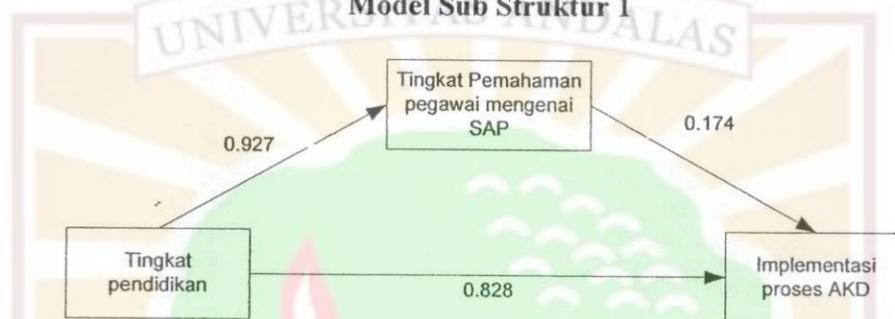
$$y = \overset{(0.927*0.174)}{0.161} X_1 + \overset{(0.753*0.174)}{0.085} X_2 + 0.174Z$$

(0.072) (0.132) (0.558)

Model persamaan struktural diatas dapat dipecah menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Implementasi Proses AKD Melalui Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Gambar 4.3
Model Sub Struktur 1



Dari persamaan hasil analisa jalur dan gambar 4.3 dapat dilihat besar pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap implementasi proses AKD sebesar 0.828 sedangkan besar pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap implementasi melalui tingkat pemahaman mengenai SAP sebesar 0.161. Dengan demikian pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung ($0.828 > 0.161$) artinya *tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel kurang mempengaruhi tingkat pendidikan terhadap implementasi proses AKD*

2. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Implementasi Proses AKD Melalui Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

Gambar 4.4
Model Sub Struktur 2



Dan untuk pengaruh langsung pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD sebesar 0.621 sedangkan besar pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap implementasi melalui tingkat pemahaman mengenai SAP sebesar 0.085. Dengan demikian pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung ($0.621 > 0.085$), artinya *tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening kurang mempengaruhi pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD melalui tingkat pemahaman karyawan mengenai SAP. Dengan demikian **H6 dapat diterima**, artinya *tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening tidak terlalu mempengaruhi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD* atau dapat dikatakan *tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP kurang mampu memediasi hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD.*

4.3 Pembahasan

Berdasarkan analisa regresi untuk hipotesa pertama, diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi proses AKD. Hal ini dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($3.892 > 2.110$) dengan signifikansi $0.001 < 0,05$.

Tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat dan jenis pendidikan formal pada saat diterima sebagai calon pegawai negeri sipil dan sampai dengan saat ini serta pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa dari 20 responden saat diterima sebagai CPNS terdiri dari 9 orang responden (45%) berpendidikan SMA/ sederajat, 8 orang responden (40%) berpendidikan D3 dan 3 orang responden (15%) berpendidikan S1. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS, responden yang berpendidikan D3 tetap sebanyak 8 orang (40%), responden yang berpendidikan S1 menjadi 10 orang (50%) dan responden yang berpendidikan S2 menjadi 2 orang (10%). Sementara pada tabel 4.5 terlihat mayoritas responden saat diterima sebagai CPNS adalah berpendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang responden (45%), yang berpendidikan D3, 8 orang (40%) dan yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang (30%). Dari tabel 4.6 terlihat bahwa berdasarkan jenis pendidikan, dari 20 responden saat diterima sebagai CPNS terdapat 4 orang responden (20%) yang berpendidikan SMA/SMK Non ekonomi, 5 orang responden (25%) yang berpendidikan SMK jurusan akuntansi, 8 orang responden (40%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, dan 3 orang responden (15%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, terdapat 8 orang responden (40%) yang berpendidikan D3/S1 non

akuntansi, 10 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi, dan 2 orang responden (10%) berpendidikan S2.

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa untuk unit kerja SKPKD saat diterima sebagai CPNS terdiri dari 1 orang responden (10%) yang berpendidikan SMA/SMK Non Ekonomi, 2 orang responden (20%) yang berpendidikan SMK jurusan akuntansi, 6 orang responden (60%) yang berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi dan 1 orang responden (10%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini terdiri dari 6 orang responden (60%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, 3 orang responden (30%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi, dan 1 orang responden (10%) berpendidikan S2.

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa dari 20 responden mayoritas 10 responden (50%) hanya mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan sebanyak 1 x, 4 responden (20%) mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan sebanyak 2 x, 3 responden (15%) mengikuti pelatihan dan pendidikan sebanyak 3 x dan masih ada yang tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan yaitu 3 orang responden (15%).

Berdasarkan kondisi di atas dan dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan implementasi proses AKD. Dilihat dari nilai koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan sebesar 0.168 menunjukkan bahwa setiap nilai tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.168. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi

tingkat pendidikan pegawai serta semakin seringnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.

Dalam rangka implementasi proses akuntansi keuangan daerah baik pada tingkat entitas akuntansi maupun ditingkat entitas pelaporan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi keuangan daerah. Pengetahuan akuntansi keuangan daerah karyawan dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Berkaitan dengan tingkat pendidikan formal karyawan yang melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah dapat direncanakan dan dipersiapkan oleh daerah melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Tingkat pendidikan pegawai atau calon pegawai negeri sipil yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan proses akuntansi tersebut adalah sarjana (S1) akuntansi atau diploma (D3) Akuntansi.

Selain memperhatikan tingkat pendidikan formal pegawai pada saat penerimaan, agar dapat menghadapi segala hambatan-hambatan dan keterbatasan-keterbatasan dalam melaksanakan pekerjaannya, selanjutnya pegawai tersebut juga harus ditingkatkan pengetahuannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan implementasi proses akuntansi keuangan daerah melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Begitu juga halnya untuk hipotesa kedua, dimana ditemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses AKD. Dari analisa

regresi yang dilakukan ditemukan nilai t hitung $> t$ tabel ($2.919 > 2.110$) dengan signifikansi $0.010 < 0.05$.

Pengalaman kerja yang dalam penelitian ini menggunakan indikator lama bekerja dan lama bekerja pada bagian keuangan. Berkaitan dengan hasil penelitian, pegawai yang melaksanakan tugas akuntansi di SKPD dan SKPKD, berdasarkan tabel 4.9 dijelaskan bahwa dari 20 orang responden mayoritas 9 orang responden (45%) sudah bekerja sebagai PNS berkisar antara 3 – 4 tahun, 5 orang responden (25%) sudah bekerja sebagai PNS berkisar 4 – 5 tahun, dan 3 orang responden (15%) sudah bekerja sebagai PNS masing – masing < 2 tahun dan > 5 tahun. Sementara itu berdasarkan dari tabel 4.10 terlihat bahwa dari 20 orang responden mayoritas 8 responden (40%) bekerja pada bagian keuangan masih kurang dari 2 tahun, 7 orang responden (35%) bekerja pada bagian keuangan selama antara 2–3 tahun, 4 orang responden (20%) bekerja pada bagian selama 3 – 4 tahun, dan 1 orang responden (5%) sudah bekerja pada bagian keuangan selama 4 – 5 tahun.

Dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi variabel pengalaman kerja sebesar 0.062 menunjukkan bahwa setiap nilai pengalaman kerja mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.062. Koefisien regresi pengalaman kerja bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD, dimana semakin banyak pengalaman kerja seorang pegawai maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.

Terkait dengan kondisi di atas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai yang melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah tersebut masih memiliki pengalaman kerja yang minim. Agar dapat menjalankan setiap tahapan-tahapan yang ada dalam rangka implementasi proses AKD di daerah serta dapat memberikan hasil yang lebih baik dibutuhkan pegawai yang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup serta sudah berpengalaman dengan pekerjaan yang terkait dengan akuntansi keuangan daerah. Dengan memiliki pengalaman kerja yang cukup serta sudah berpengalaman dalam keuangan daerah, diharapkan seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Pegawai yang berpengalaman dalam implementasi proses akuntansi keuangan daerah akan mempunyai suatu pengetahuan atau keterampilan khusus mengatasi permasalahan dalam pekerjaan serta mempunyai kiat-kiat dan strategi tertentu dalam rangka penyelesaian tugas-tugasnya.

Apabila dilihat secara simultan, berdasarkan koefisien determinasi hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa 48,3% dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja seorang pegawai dalam implementasi proses akuntansi keuangan daerah harus menjadi salah satu tolok ukur dan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada seorang pegawai. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat mulai merencanakan dan melaksanakannya pada saat akan melakukan penerimaan dan penempatan pegawai dengan memperhatikan tingkatan pendidikan serta pengalaman calon pegawai tersebut.

Berdasarkan analisa regresi untuk hipotesa ketiga, diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($5.133 > 2.110$) dan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dilihat dari tingkat dan jenis pendidikan terakhir pada saat diterima sebagai pegawai negeri sipil dan pendidikan terakhir sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilihat dari keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang sudah pernah diikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Nilai Koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan sebesar 1.959 menunjukkan setiap nilai tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP akan meningkat sebesar 1.959 . Koefisien regresi tingkat pendidikan bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP, dimana semakin naik tingkat pendidikan maka semakin meningkat tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.

Apabila dikaitkan antara tingkat pendidikan, jenis pendidikan serta pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah diikuti oleh seorang pegawai dengan tingkat pemahamannya mengenai SAP menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi setara dengan D3 dan Sarjana pada jurusan akuntansi akan lebih mudah memahami konsep SAP tersebut dibandingkan

dengan pegawai yang berpendidikan setara SMA. Hal ini juga harus ditunjang dengan pemberian pendidikan dan pelatihan tambahan kepada pegawai tersebut yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman pegawai terhadap SAP tersebut.

Berdasarkan tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.17 terlihat jelas bahwa dari 20 orang responden, mayoritas 8 orang responden (40%) masih kurang paham mengenai SAP, 5 orang responden (25%) paham mengenai SAP, 4 orang responden (20%) tidak paham mengenai SAP, 2 responden (10%) sangat paham mengenai SAP dan 1 orang responden (5%) sangat tidak paham mengenai SAP.

Hal ini mungkin disebabkan karena dari 20 orang responden saat diterima sebagai CPNS terdapat 4 orang responden (20%) yang berpendidikan SMA/SMK Non ekonomi, 5 orang responden (25%) yang berpendidikan SMK jurusan akuntansi, 8 orang responden (40%) berpendidikan D3/S1 Non Akuntansi, dan 3 orang responden (15%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi. Sedangkan setelah diterima sebagai PNS sampai saat ini, terdapat 8 orang responden (40%) yang berpendidikan D3/S1 non Akuntansi, 10 orang responden (50%) berpendidikan D3/S1 Akuntansi, dan 2 orang responden (10%) berpendidikan S2.

Berdasarkan analisa regresi, untuk hipotesa keempat, diketahui bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Hal ini dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($4.172 > 2.110$) dengan signifikansi $0.001 < 0,05$.

Pengalaman kerja seorang pegawai merupakan salah faktor yang juga menentukan tingkat pemahamannya mengenai SAP. Nilai koefisien korelasi variabel pengalaman kerja sebesar sebesar 0.784 menunjukkan bahwa setiap nilai

pengalaman kerja mengalami peningkatan, maka tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP akan meningkat sebesar 0.784. Koefisien regresi pengalaman kerja bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pengalaman kerja dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP, dimana semakin banyak pengalaman kerja seorang pegawai maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.

Pada tabel 4.17 terlihat jelas bahwa dari 20 orang responden, mayoritas 8 orang responden (40%) masih kurang paham mengenai SAP, 5 orang responden (25%) paham mengenai SAP, 4 orang responden (20%) tidak paham mengenai SAP, 2 responden (10%) sangat paham mengenai SAP dan 1 orang responden (5%) sangat tidak paham mengenai SAP. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena didasarkan pada tabel 4.9 terlihat bahwa dari 20 responden tersebut 9 responden (45%) memiliki pengalaman kerja berkisar antara 3 – 4 tahun, 5 responden (25%) sudah bekerja sebagai PNS berkisar 4 – 5 tahun, dan 3 orang responden (15%) sudah bekerja sebagai PNS masing – masing < 2 tahun dan > 5 tahun. Disamping itu, dilihat dari tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa dari 20 orang responden, mayoritas 8 responden (40%) memiliki pengalaman bekerja pada bagian keuangan masih kurang dari 2 tahun, 7 responden (35%) bekerja pada bagian keuangan selama antara 2–3 tahun, 4 responden (20%) bekerja pada bagian selama 3 – 4 tahun, dan 1 orang responden (5%) sudah bekerja pada bagian keuangan selama 4 – 5 tahun.

Agar dapat lebih meningkatkan pemahaman pegawai mengenai SAP, dibutuhkan pegawai yang sudah memiliki pengalaman bekerja yang cukup serta

sudah berpengalaman pada bagian pengelolaan keuangan. Pegawai yang berpengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan di daerah, akan lebih mudah mengetahui gejala-gejala kesulitan yang akan timbul dalam bekerja karena sudah memiliki pemahaman yang memadai dan cukup mengenai SAP.

Apabila dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,627 menjelaskan bahwa 62.7% dari variasi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Berdasarkan hasil analisa regresi untuk hipotesia kelima, diketahui tingkat pemahaman seorang pegawai mengenai SAP memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD. Hal ini dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($3.298 > 2.101$) dengan signifikansi $0.004 < 0,05$. Dengan nilai koefisien korelasi variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebesar 0.059 menunjukkan bahwa setiap nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP mengalami peningkatan, maka implementasi proses AKD akan meningkat sebesar 0.059. Koefisien regresi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP bernilai positif, ini berarti terdapat hubungan yang positif antara tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dengan implementasi proses AKD, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP maka semakin meningkat pula implementasi proses AKD.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.614 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP dengan implementasi proses AKD. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,377 artinya 37.7% dari variasi implementasi proses AKD bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP.

Dengan memperhatikan tabel 4.17 dan tabel 4.18, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan proses Akuntansi Keuangan Daerah dalam hal kelengkapan bukti – bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh masing – masing unit kinerja yang terdiri dari SKPKD, Dinas Pertanakan, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU 100% dilakukan secara lengkap. Untuk penjurnalan, dari 6 (enam) unit kerja , 50% dilaksanakan namun tidak lengkap, dan 50% lagi tidak dilaksanakan sama sekali. Dan untuk pelaksanaan posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian 100 % tidak dilakukan oleh keenam unit kerja tersebut. Begitu pula halnya dengan pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sedangkan pembuatan Laporan Keuangan seluruh unit kerja (100%) melakukannya namun tidak secara lengkap. Hal ini berkemungkinan disebabkan karena mayoritas 8 orang responden (40%) masih kurang paham mengenai SAP, 5 orang responden (25%) paham mengenai SAP, 4 orang responden (20%) tidak paham mengenai SAP, 2 responden (10%) sangat paham mengenai SAP dan 1 orang responden (5%) sangat tidak paham mengenai SAP.

Untuk dapat melakukan proses akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan SAP tersebut, pegawai yang bertanggungjawab dalam hal ini harus

memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam SAP tersebut. Untuk dapat memahami dan melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah juga ditunjang dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Setelah mereka memahami SAP diharapkan pegawai tersebut dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Dari hasil analisa jalur, ditemukan bahwa besar pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap implementasi proses AKD sebesar 0.828 sedangkan besar pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap implementasi melalui tingkat pemahaman mengenai SAP sebesar 0.161. Karena pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung ($0.828 > 0.161$), maka dapat disimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi proses AKD melalui tingkat pemahaman mengenai SAP terbukti meskipun besar pengaruh tersebut tidak terlalu besar.

Begitu juga halnya untuk pengalaman kerja. Berdasarkan analisa jalur yang dilakukan, ditemukan bahwa pengaruh langsung pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD sebesar 0.621 sedangkan besar pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap implementasi melalui tingkat pemahaman mengenai SAP sebesar 0.085. Karena pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung ($0.621 > 0.085$), maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi proses AKD melalui tingkat pemahaman mengenai SAP terbukti namun besar pengaruh tersebut tidak terlalu besar.

Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pegawai pada saat awal diterima sebagai CPNS mayoritas masih berpendidikan SMA dan D3 dan pada

saat sudah menjadi pegawai tidak semuanya yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pegawai tersebut juga masih kurang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis tambahan pada saat sudah bekerja sebagai pegawai. Hal ini dapat menyebabkan masih banyaknya pegawai yang kurang memahami SAP sehingga dalam pengimplementasian proses akuntansi keuangan daerah belum tercapai sesuai dengan keinginan.

Disamping itu, juga disebabkan karena adanya pegawai yang meskipun berpendidikan tinggi namun pengalaman kerja yang dimiliki masih rendah sehingga pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan masih rendah sehingga dalam pengimplementasian proses akuntansi keuangan daerah belum tercapai sesuai dengan keinginan. Pada umumnya pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah tersebut masih memiliki pengalaman kerja yang masih rendah. Kebanyakan pegawai tersebut baru memiliki pengalaman bekerja pada bagian keuangan dan keterlibatannya dalam proses akuntansi keuangan daerah kurang dari 4 tahun, karena kebanyakan pegawai yang dilibatkan dalam implementasi proses akuntansi keuangan daerah tersebut masih banyak yang berstatus sebagai pegawai baru atau CPNS.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP sebagai variabel intervening kurang mampu mempengaruhi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap implementasi proses AKD atau dengan kata lain tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP kurang mampu memediasi hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan implementasi proses AKD pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian peternakan dan perikanan serta SKPKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

5.2 Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap implementasi proses AKD. Tingkat dan jenis pendidikan formal yang ditamatkan oleh seorang pegawai akan menentukan keberhasilan dalam implementasi proses AKD di tingkat SKPD dan SKPKD. Dalam hal implementasi proses AKD, agar terlaksana dengan baik dan sistematis dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang akan diembannya. Karena implementasi proses AKD terkait dengan siklus dan tahap-tahap dalam proses akuntansi keuangan daerah, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan penerimaan pegawai yang memiliki pendidikan D3 atau S1 Akuntansi. Selanjutnya, setelah melakukan penerimaan pegawai tersebut, juga perlu memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan implementasi AKD tersebut guna lebih meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan implementasi proses AKD atau dengan memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja mempengaruhi implementasi proses AKD. Agar proses AKD dapat diimplementasikan dengan baik di pemerintah daerah, pihak pemerintah daerah juga harus mempersiapkan dan menempatkan sumber daya manusia pegawai yang berpengalaman. Pegawai yang memiliki masa kerja yang memadai dan

berpengalaman dalam melaksanakan proses AKD akan ikut menentukan keberhasilan dalam implementasi proses AKD tersebut. Pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang cukup akan sangat menentukan kemampuan yang dimilikinya.

Hasil lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pegawai juga mempengaruhi tingkat pemahaman pegawai mengenai SAP. Pemahaman pegawai mengenai SAP akan lebih baik jika tingkat pendidikan pegawai tersebut sudah mencapai rata-rata diploma tiga (D3) atau sarjana (S1) Akuntansi serta telah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis maupun yang lainnya yang berkaitan dengan SAP tersebut. Selanjutnya, perlu memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi agar kemampuan pegawai tersebut bertambah meningkat dalam memahami SAP. Disamping itu, pemahaman pegawai mengenai SAP salah satunya juga ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari temuan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati oleh peneliti berikutnya :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Kelemahan angket adalah responden kurang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.
2. Penelitian ini hanya melihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja saja maka penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lainnya.

5.4 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan dari hasil penelitian di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan:
 - a. Dalam rangka menyusun perencanaan dan strategi guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah
 - c. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
 - d. Dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan implementasi akuntansi keuangan daerah melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, untuk lebih memberikan kesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan latihan (diklat) atau bimbingan teknis yang berkaitan dengan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan supaya dapat lebih

mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dapat membantu memberikan strategi dan solusi kepada pemerintah dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan tugas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani Aritonang, dkk. 2007. *Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.5 No.6, 2008.
- Asri, Marwan. 1986. *Pengelolaan Karyawan*. BPFE : Yogyakarta.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Efferin, Sujoko, dkk, 2008. *Metode Penelitian Akuntansi (Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Telaah Kritis – PP No.24 Tahun 2005*, Terbitan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Foster, Bill. 2001. *Pembinaan untuk Peningkatan Kinerja Karyawan*. PPM : Jakarta
- Nordiawan, Deddi, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, cetakkan keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hafiz Tanjung, Abdul, 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah – Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Harahap, Sofyan S, 2004. *Teori Akuntansi*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dkk, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Kaiser H dan Rice.J. 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34 No.1 Page 111-117

Latifah, Lyna dkk. 2006. *Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 2007.

Manulang. 1984. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mashuri, 2000, *Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah Pembangunan Pendidikan*, Jakarta : Prisma.

Nunnally, 1967, *psychometric Theory*. Mc. Gram Hilal, New York.

Singgih, Santosa, 2002, *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*, Penerbit PT. Alex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;

UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

I. PENDAHULUAN

Kuisisioner ini digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi Pemerintahan / Pengawasan Keuangan Negara dan Daerah Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, untuk kepentingan penulisan tesis dibawah bimbingan Ibu DR. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak. dan Bapak Suhanda, S.E., M.Si., Ak. dengan Judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Implementasi Proses Akuntansi Keuangan Daerah dengan Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten Solok Selatan”**.

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi jawaban atas berbagai pertanyaan dalam kuisisioner guna kelancaran penelitian ini. Saya menjamin data-data yang saya peroleh hanya akan digunakan semata-mata untuk kepentingan tesis saya.

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. NIP :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. OPD/SKPD :
7. Tingkat dan Jenis Pendidikan saat diterima sebagai CPNS

No	Uraian	Tingkat (ceklist)	Jenis (Penjelasan)
1.	Dibawah SMA/Sederajad		
2.	SMA/SMK/Sederajad		
3.	D3		
4.	S1		
5.	S2		

8. Pendidikan terakhir sampai saat ini

No	Uraian	Tingkat (ceklist)	Jenis (Penjelasan)
1.	Dibawah SMA/Sederajat		
2.	SMA/SMK/Sederajat		
3.	D3		
4.	S1		
5.	S2		

9. Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

1.	Pernah, berapa kali?	
2.	Tidak Pernah	

10. TMT sebagai CPNS :

11. Masa Kerja pada Bagian Keuangan :

Padang Aro,

2010

(_____)
UNTUK KEDJAJA NIP. BANGSA

III. DAFTAR PERTANYAAN

Cara pengisian : Bapak/Ibu diminta mengisi pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda Silang (X) sesuai dengan pilihan yang telah disediakan menurut pendapat Bapak/Ibu masing-masing.

Keterangan : S = SETUJU
TS = TIDAK SETUJU

NO	PERNYATAAN	S	TS
1.	Informasi mengenai klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja, disajikan dalam Laporan Arus Kas		
2.	Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran		
3.	Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat Pengesahan dan alokasi anggaran		
4.	Akuntansi pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah		
5.	Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas Netto		
6.	Pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas adalah belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi		
7.	Belanja Negara/daerah diakui pada saat terjadinya Pengajuan SPP dan SPM		
8.	Contoh belanja yang termasuk dalam Klasifikasi ekonomi untuk belanja Pemerintah Daerah antara lain adalah Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial		
9.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas Netto		
10.	Contoh persediaan meliputi antara lain Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
11.	Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal		
12.	Apabila persediaan diperoleh dengan cara donasi atau rampasan, maka persediaan disajikan sebesar Biaya perolehannya		
13.	Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan Biaya produksinya		
14.	Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, Tidak dimasukan sebagai persediaan		
15.	Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dibagi atas Investasi Permanen dan Non Permanen		

NO	PERNYATAAN	S	TS
16.	Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar Nilai nominal deposito		
17.	Penilaian investasi pemerintah dapat dilakukan dengan metode Ekuitas saja		
18.	Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas dapat dilakukan pemerintah apabila Kepemilikan terhadap investasi tersebut 20% sampai 40%		
19.	Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain Konstruksi dalam pengerjaan.		
20.	Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik disebut dengan Masa manfaat Aset.		
21.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset berwujud dan Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 3. Tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. Diperoleh atau dibangun untuk digunakan 5. Dibangun sendiri setelah itu diserahkan kepada masyarakat seperti Kelompok Tani 6. Menggunakan dana APBD sendiri Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria sesuai nomor 1, 2, 3, dan 4		
22.	Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan dan jumlah yang sama diakui sebagai belanja modal dalam LRA		
23.	Standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Oleh karena itu penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan.		
24.	Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan		
25.	Contoh Komponen Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset tetap adalah Biaya simpan dan bongkar muat		
26.	Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang dapat digunakan menurut SAP adalah Garis lurus saja.		
27.	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi defnisi aset tetap dan masih memiliki nilai, tetap tercantum pada neraca yaitu pada pos Aset tetap lainnya		
28.	Suatu benda bewujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika sudah menghasilkan aset tetap		
29.	Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehannya		

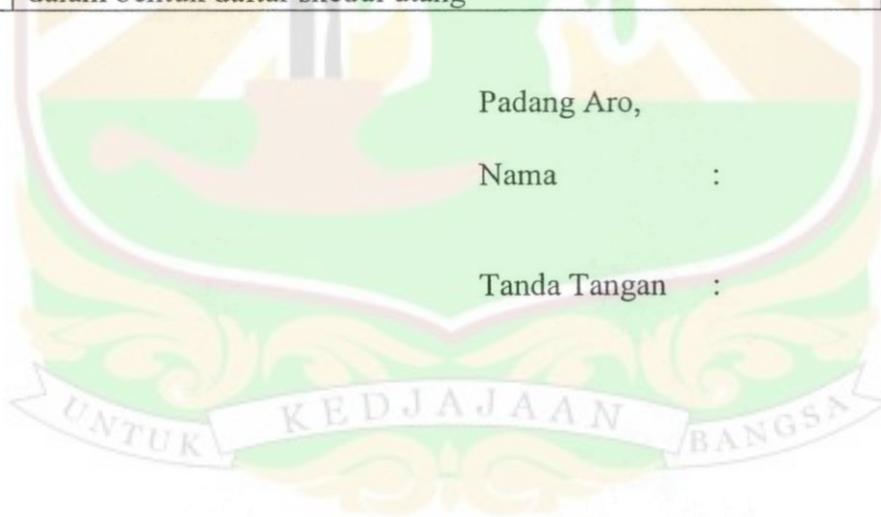
NO	PERNYATAAN	S	TS
30.	Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama konstruksi harus dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi		
31.	Konstruksi dalam pengerjaan dapat dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi tersebut secara substansi telah selesai dikerjakan dan telah memberikan manfaat		
32.	1. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan 2. jumlah biaya yang telah dikeluarkan 3. uang muka kerja yang diberikan 4. retensi Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK mengenai konstruksi dalam pengerjaan adalah 2 dan 4 saja		
33.	Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah disebut Ekuitas dana		
34.	Kewajiban diakui pada saat Akhir periode pelaporan		
35.	Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan Pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan		
36.	Agar memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya, Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang		

Padang Aro,

2010

Nama :

Tanda Tangan :



LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

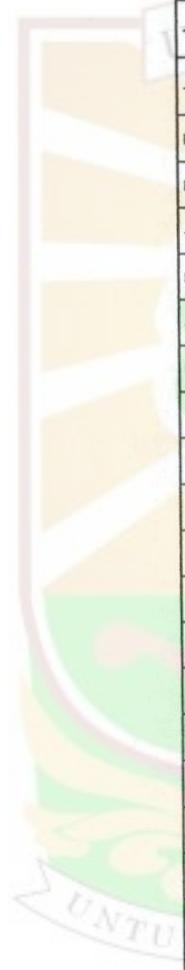


Resp	Dinas	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan					Pengalaman		Tingkat Pemahaman	%
				1	2	3	4	5	1	2		
1	SKPKD	Perempuan	Penata Muda/ III/a	S1	S1	EKO	EKO	2x	< 2 tahun	< 2 tahun	21-25	66% - 80%
2	SKPKD	Laki - Laki	Penata /III/c	SMA	S2	SMA NE	S2	2x	> 5 tahun	3 - 4 tahun	> 25	> 80%
3	SKPKD	Perempuan	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	3 X	3 - 4 tahun	3 - 4 tahun	21-25	66% - 80%
4	Pertanakan	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	1 X	3 - 4 tahun	< 2 tahun	10-15	30% - 50%
5	Pertanakan	Perempuan	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA NE	EKO	1 X	> 5 tahun	2 - 3 tahun	21-25	66% - 80%
6	SKPKD	Laki - Laki	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	1 x	3 - 4 tahun	2 - 3 tahun	21-25	66% - 80%
7	SKPKD	Perempuan	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	TP	3 - 4 tahun	< 2 tahun	10-15	30% - 50%
8	SKPKD	Laki - Laki	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	2 x	4 - 5 tahun	3 - 4 tahun	16-20	51% - 65%
9	Sekda	Perempuan	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	3 x	> 5 tahun	4 - 5 tahun	> 25	> 80%
10	Sekda	Laki - Laki	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	TP	4 - 5 tahun	2 - 3 tahun	16-20	51% - 65%
11	SKPKD	Laki - Laki	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	1 x	4 - 5 tahun	2 - 3 tahun	16-20	51% - 65%
12	Dinkes	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	1 X	3 - 4 tahun	2 - 3 tahun	16-20	51% - 65%
13	Dinkes	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	S1	S1	EKO	EKO	3 X	< 2 tahun	< 2 tahun	21-25	66% - 80%
14	SKPKD	Laki - Laki	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	1 X	3 - 4 tahun	2 - 3 tahun	16-20	51% - 65%
15	SKPKD	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	TP	3 - 4 tahun	< 2 tahun	10-15	30% - 50%
16	SKPKD	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	1 x	3 - 4 tahun	3 - 4 tahun	16-20	51% - 65%
17	Pendidikan	Perempuan	Pengatur TK I/ II/d	D3	D3	NON EKO	NON EKO	1 x	3 - 4 tahun	< 2 tahun	10-15	30% - 50%
18	Pendidikan	Laki - Laki	Penata /III/c	S1	S2	EKO	S2	1 x	< 2 tahun	< 2 tahun	> 5	< 30%
19	PU	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	2 x	4 - 5 tahun	2 - 3 tahun	16 - 20	51% - 65%
20	PU	Laki - Laki	Penata Muda/ III/a	SMA	S1	SMA E	EKO	1 x	4 - 5 tahun	< 2 tahun	16 - 20	51% - 65%

TABULASI DATA

Tingkat Pemahaman mengenai PSAP

Resp	Dinas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	SKPKD	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	SKPKD	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	SKPKD	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Pertanahan	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Pertanahan	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	SKPKD	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	SKPKD	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	SKPKD	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Sekda	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Sekda	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	SKPKD	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Dinkes	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Dinkes	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	SKPKD	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	SKPKD	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	SKPKD	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Pendidikan	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Pendidikan	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	PU	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	PU	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



TABULASI DATA

Resp	Dinas	Implementasi Proses AKD													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
2	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
3	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
4	Pertanakaan	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
5	Pertanakaan	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
6	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
7	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
8	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
9	Sekda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
10	Sekda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
11	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
12	Dinkes	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
13	Dinkes	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
14	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
15	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
16	SKPKD	5	5	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
17	Pendidikan	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
18	Pendidikan	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
19	PU	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
20	PU	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1

LAMPIRAN 3

DISTRIBUSI PROFIL RESPONDEN

Dinas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SKPD	10	50.0	50.0	50.0
	Pertanakan	2	10.0	10.0	60.0
	Sekda	2	10.0	10.0	70.0
	Dinkes	2	10.0	10.0	80.0
	Pendidikan	2	10.0	10.0	90.0
	PU	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	14	70.0	70.0	70.0
	Perempuan	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Pangkat/Golongan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penata /III/c	2	10.0	10.0	10.0
	Penata Muda/ III/a	10	50.0	50.0	60.0
	Pengatur TK I/ II/d	8	40.0	40.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Pendidikan Saat diterima CPNS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	8	40.0	40.0	40.0
	S1	3	15.0	15.0	55.0
	SMA	9	45.0	45.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Pendidikan terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	8	40.0	40.0	40.0
	S1	10	50.0	50.0	90.0
	S2	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Jenis Pendidikan saat diterima CPNS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	EKO	3	15.0	15.0	15.0
	NON EKO	8	40.0	40.0	55.0
	SMA E	7	35.0	35.0	90.0
	SMA NE	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Jenis Pendidikan terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	EKO	10	50.0	50.0	50.0
	NON EKO	8	40.0	40.0	90.0
	S2	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Berapa kali mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 x	10	50.0	50.0	50.0
	2 x	4	20.0	20.0	70.0
	3 x	3	15.0	15.0	85.0
	Tidak Pernah	3	15.0	15.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Lama Bekerja sebagai PNS

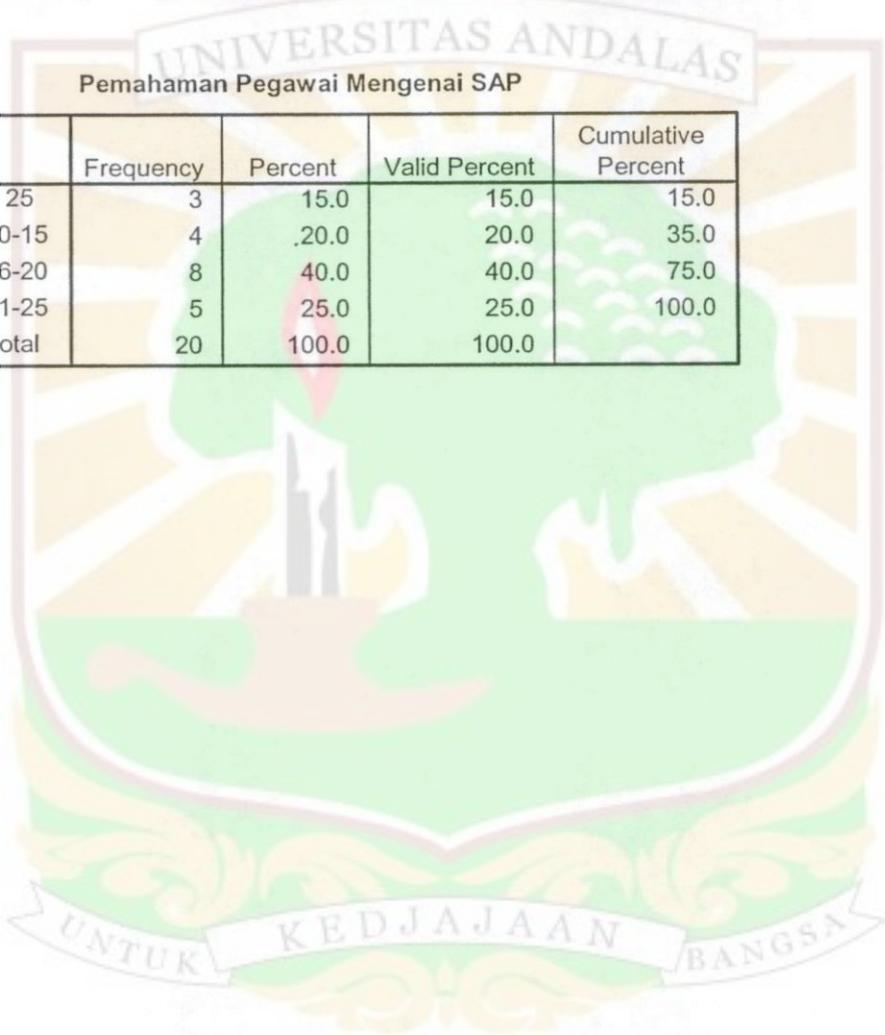
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2 tahun	3	15.0	15.0	15.0
	> 5 tahun	3	15.0	15.0	30.0
	3 - 4 tahun	9	45.0	45.0	75.0
	4 - 5 tahun	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Lama Bekerja pada bagian keuangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 2 tahun	8	40.0	40.0	40.0
2 - 3 tahun	7	35.0	35.0	75.0
3 - 4 tahun	4	20.0	20.0	95.0
4 - 5 tahun	1	5.0	5.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ANDALAS
Pemahaman Pegawai Mengenai SAP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid > 25	3	15.0	15.0	15.0
10-15	4	20.0	20.0	35.0
16-20	8	40.0	40.0	75.0
21-25	5	25.0	25.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	



LAMPIRAN 4

Uji VALIDITAS

Factor Analysis

Correlation Matrix^a

		Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Tingkat Pemahaman
Correlation	Implementasi AKD	1.000	.613	.672	.733
	Tingkat Pendidikan	.613	1.000	.312	.630
	Pengalaman Kerja	.672	.312	1.000	.591
	Tingkat Pemahaman	.733	.630	.591	1.000
Sig. (1-tailed)	Implementasi AKD		.002	.001	.000
	Tingkat Pendidikan	.002		.090	.001
	Pengalaman Kerja	.001	.090		.003
	Tingkat Pemahaman	.000	.001	.003	

a. Determinant = .126

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.740
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	34.832
	df	6
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Tingkat Pemahaman
Anti-image Covariance	Implementasi AKD	.325	-.150	-.194	-.120
	Tingkat Pendidikan	-.150	.517	.130	-.170
	Pengalaman Kerja	-.194	.130	.493	-.118
	Tingkat Pemahaman	-.120	-.170	-.118	.380
Anti-image Correlation	Implementasi AKD	.737 ^a	-.366	-.486	-.342
	Tingkat Pendidikan	-.366	.715 ^a	.257	-.384
	Pengalaman Kerja	-.486	.257	.705 ^a	-.273
	Tingkat Pemahaman	-.342	-.384	-.273	.791 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

	Initial	Extraction
Implementasi AKD	1.000	.854
Tingkat Pendidikan	1.000	.969
Pengalaman Kerja	1.000	.948
Tingkat Pemahaman	1.000	.998

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.793	69.827	69.827	2.793	69.827	69.827	1.470	36.758	36.758
2	.694	17.347	87.174	.694	17.347	87.174	1.285	32.117	68.874
3	.282	7.046	94.220	.282	7.046	94.220	1.014	25.346	94.220
4	.231	5.780	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Implementasi AKD	.912	-.068	.133
Tingkat Pendidikan	.759	.590	.212
Pengalaman Kerja	.768	-.580	.149
Tingkat Pemahaman	.892	.066	-.444

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Implementasi AKD	.664	.522	.375
Tingkat Pendidikan	.133	.936	.276
Pengalaman Kerja	.938	.085	.245
Tingkat Pemahaman	.362	.361	.859

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	.627	.563	.539
2	-.702	.709	.075
3	.340	.425	-.839

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

LAMPIRAN 5

UJI RELIABILITAS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.684	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Implementasi AKD	10.0650	6.268	.818	.725
Tingkat Pendidikan	8.7405	4.958	.539	.617
Pengalaman Kerja	8.4055	2.964	.562	.568
Tingkat Pemahaman	7.8305	2.387	.733	.403

LAMPIRAN 6

UJI NORMALITAS

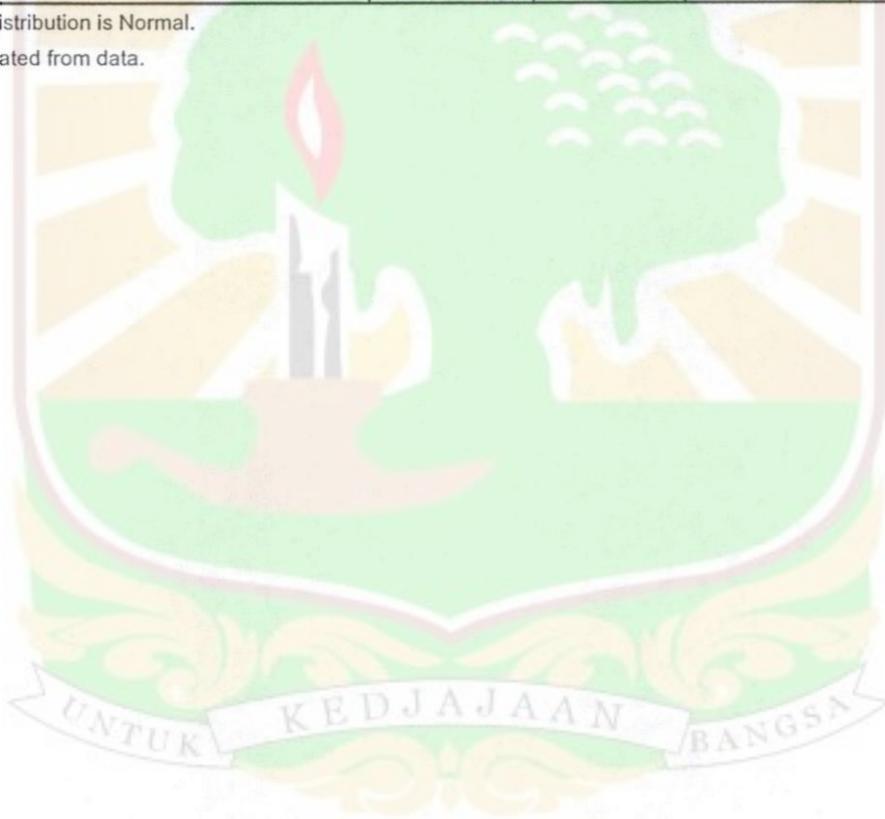
NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Tingkat Pemahaman
N	20	20	20	20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.6155	2.9500	2.5750
	Std. Deviation	.09473	.46736	.94972
Most Extreme Differences	Absolute	.217	.276	.127
	Positive	.133	.276	.127
	Negative	-.217	-.127	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z	.973	1.234	.569	1.066
Asymp. Sig. (2-tailed)	.301	.095	.902	.206

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



LAMPIRAN 7

UJI HOMOGENITAS

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Implementasi AKD	1.169	5	14	.372
Tingkat Pendidikan	1.113	5	14	.397
Pengalaman Kerja	1.844	5	14	.169
Tingkat Pemahaman	.845	5	14	.540



LAMPIRAN 8

UJI HIPOTESIS

1. Model Regresi Persamaan 1 $\Rightarrow y = a + b_1x_1 + b_2x_2$
 (Pengaruh Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap Implementasi AKD)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Implementasi AKD	1.6155	.09473	20
Tingkat Pendidikan	2.9500	.46736	20
Pengalaman Kerja	2.5750	.94972	20

Correlations

		Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja
Pearson Correlation	Implementasi AKD	1.000	.473	.147
	Tingkat Pendidikan	.473	1.000	-.572
	Pengalaman Kerja	.147	-.572	1.000
Sig. (1-tailed)	Implementasi AKD	.	.018	.268
	Tingkat Pendidikan	.018	.	.004
	Pengalaman Kerja	.268	.004	.
N	Implementasi AKD	20	20	20
	Tingkat Pendidikan	20	20	20
	Pengalaman Kerja	20	20	20

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.695 ^a	.483	.422	.07203	.483	7.929	2	17	.004

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.082	2	.041	7.929	.004 ^a
	Residual	.088	17	.005		
	Total	.170	19			

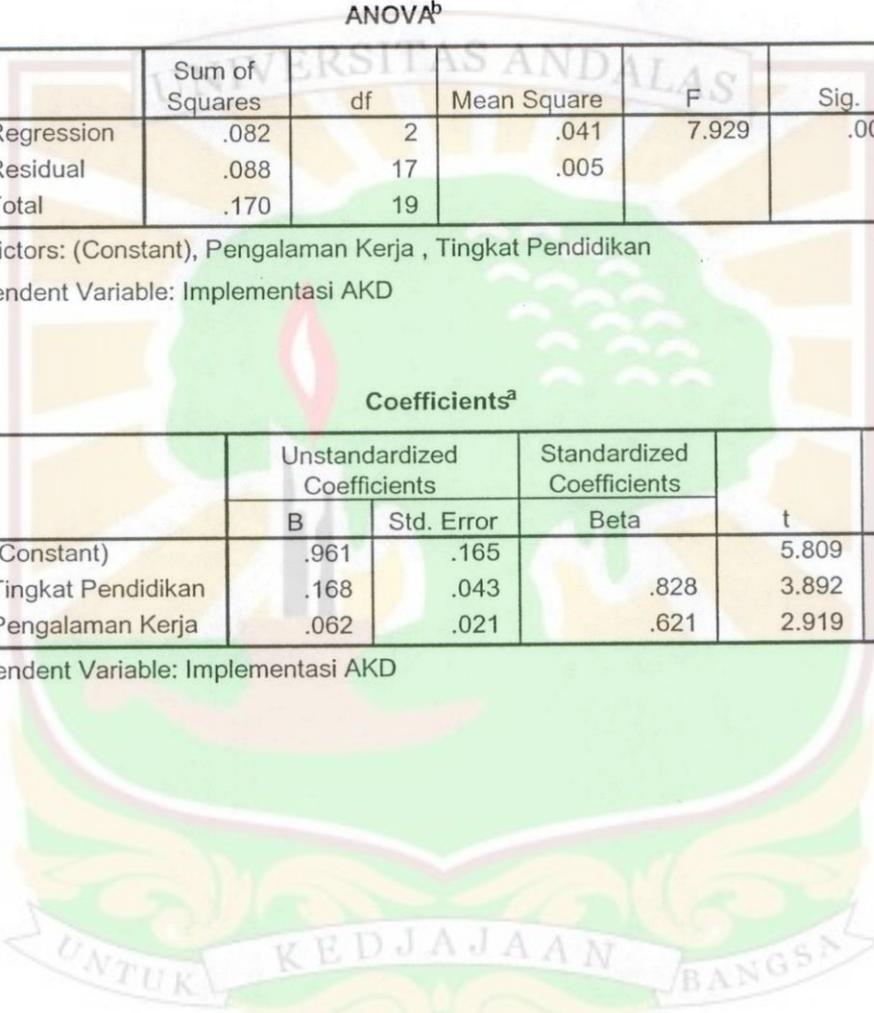
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.961	.165		5.809	.000
	Tingkat Pendidikan	.168	.043	.828	3.892	.001
	Pengalaman Kerja	.062	.021	.621	2.919	.010

a. Dependent Variable: Implementasi AKD



2. Persamaan Regresi Model 2 $\Rightarrow z = a + b_1x_1 + b_2x_2$
 (Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.627	.583	.63769

- a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.637	2	5.819	14.309	.000 ^a
	Residual	6.913	17	.407		
	Total	18.550	19			

- a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan
 b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-4.447	1.465		-3.037	.007
	Tingkat Pendidikan	1.959	.382	.927	5.133	.000
	Pengalaman Kerja	.784	.188	.753	4.172	.001

- a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman

3. Persamaan Regresi Model 3 $\Rightarrow y = a + bz$
(Pengaruh tingkat pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah terhadap implementasi AKD)

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tingkat Pemahaman	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 ^a	.377	.342	.07684

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.064	1	.064	10.878	.004 ^a
	Residual	.106	18	.006		
	Total	.170	19			

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.418	.062		22.809	.000
	Tingkat Pemahaman	.059	.018	.614	3.298	.004

a. Dependent Variable: Implementasi AKD

3. Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja mempengaruhi implementasi proses akuntansi keuangan daerah melalui tingkat pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah

Regression

Correlations

		Implementasi AKD	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Tingkat Pemahaman
Pearson Correlation	Implementasi AKD	1.000	.473	.147	.614
	Tingkat Pendidikan	.473	1.000	-.572	.496
	Pengalaman Kerja	.147	-.572	1.000	.223
	Tingkat Pemahaman	.614	.496	.223	1.000
Sig. (1-tailed)	Implementasi AKD	.	.018	.268	.002
	Tingkat Pendidikan	.018	.	.004	.013
	Pengalaman Kerja	.268	.004	.	.172
	Tingkat Pemahaman	.002	.013	.172	.
N	Implementasi AKD	20	20	20	20
	Tingkat Pendidikan	20	20	20	20
	Pengalaman Kerja	20	20	20	20
	Tingkat Pemahaman	20	20	20	20

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan	.	Enter
2	Tingkat Pemahaman ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Implementasi AKD

Model Summary^e

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.695 ^a	.483	.422	.07203	.483	7.929	2	17	.004	2.692
2	.703 ^b	.494	.399	.07343	.011	.358	1	16	.558	

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan, Tingkat Pemahaman

c. Dependent Variable: Implementasi AKD

ANOVA^c

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.082	2	.041	7.929	.004 ^a
	Residual	.088	17	.005		
	Total	.170	19			
2	Regression	.084	3	.028	5.206	.011 ^b
	Residual	.086	16	.005		
	Total	.170	19			

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan, Tingkat Pemahaman

c. Dependent Variable: Implementasi AKD

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	5% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
	1	(Constant)	.961			.165	.828	5.809	.000	.612	1.310		
	Tingkat Pendidikan	.168	.043	.828	3.892	.001	.077	.259	.473	.686	.679	.673	1.487
	Pengalaman Kerja	.062	.021	.621	2.919	.010	.017	.107	.147	.578	.509	.673	1.487
2	(Constant)	1.035	.209	.828	4.943	.000	.591	1.479					
	Tingkat Pendidikan	.135	.070	.666	1.924	.072	-.014	.284	.473	.434	.342	.264	3.791
	Pengalaman Kerja	.049	.031	.490	1.587	.132	-.016	.114	.147	.369	.282	.332	3.009
	Tingkat Pemahaman	.017	.028	.174	.598	.558	-.043	.076	.614	.148	.106	.373	2.683

a. Dependent Variable: Implementasi AKD

Excluded Variables^b

Model	Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics			
					Tolerance	VIF	Minimum Tolerance	
1	Tingkat Pemahaman	.174 ^a	.598	.558	.148	.373	2.683	.264

a. Predictors in the Model: (Constant), Pengalaman Kerja , Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Implementasi AKD



UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendidikan	.673	1.487
	Pengalaman Kerja	.673	1.487

a. Dependent Variable: Implementasi AKD

Statistik Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi AKD	20	1.36	1.78	1.6155	.09473
Tingkat Pendidikan	20	2.40	4.00	2.9500	.46736
Pengalaman Kerja	20	1.00	4.50	2.5750	.94972
Tingkat Pemahaman	20	2.00	5.00	3.3500	.98809
Valid N (listwise)	20				

